

Buku Referensi

# **DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI BISNIS (TINJAUAN PADA UMKM)**



**AUTHOR**

Dr. Hj. Sari Bulan Tambunan, S.E.,M.M.A

**PUBLIHER BY**

PT Inovasi Pratama Internasional

Buku Referensi

**DETERMINAN KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN PADA ORGANISASI BISNIS  
(Tinjauan pada UMKM)**

**Dr. Hj. Sari Bulan Tambunan, S.E.,M.M.A**



**PT Inovasi Pratama Internasional**

# **DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI BISNIS (Tinjauan pada UMKM)**

Penulis : Dr. Hj. Sari Bulan Tambunan, S.E.,M.M.A  
ISBN :  
Editor : Bincar Nasution, S.Pd., C.Mt  
Penyunting : Rahmah Juliani Siregar, M.K.M

Desain Sampul dan Tata Letak:  
*InoVal*

Penerbit:  
PT Inovasi Pratama Internasional  
Anggota IKAPI Nomor 071/SUT/2022

Redaksi:  
Jl. Cempaka No. 25 Padang Sidempuan 22725  
Telp. +628 5360 415005  
Email: cs@ipinternasional.com

Distributor Tunggal:  
PT Inovasi Pratama Internasional  
Jl. Cempaka No. 25 Padang Sidempuan 22725  
Telp. +628 5360 415005  
Email: info@ipinternasional.com

Cetakan Pertama, 25 Mei 2023

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan  
cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah dan Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku referensi yang berjudul "Determinan Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Bisnis (Tinjauan pada UMKM)". Dan tidak lupa juga mengucapkan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, berkat beliau, kita keluar dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang.

Penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung serta membantu penulisan buku referensi ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak, yaitu orang tua, rekan-rekan seperjuangan dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis sadar, bahwa buku referensi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mohon agar para pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku referensi ini agar penulis dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku referensi ini penulis buat, dengan harapan agar pembaca dapat mengetahui tentang informasi yang terkait dengan "Determinan Kualitas Laporan Keuangan pada Organisasi Bisnis" serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas. Terima kasih.

Medan, 25 Mei 2023

Penulis

Dr. Hj. Sari Bulan Tambunan, S.E.,M.M.A

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Pendahuluan .....	1
1.2 Tujuan Laporan Keuangan .....	3
1.3 Jenis-Jensi Laporan Keuangan .....	4
1.4 Karakteristik Laporan Keuangan .....	8
1.5 Manfaat Laporan Keuangan .....	12
1.6 Pengguna Laporan Keuangan.....	13
1.7 Kualitas Laporan Keuangan .....	19
1.8 Pentingya Laporan Keuangan .....	19
1.9 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan.....	20
<b>BAB II STANDAR AKUNTANSI ORGANISASI BISNIS .....</b>	<b>23</b>
2.1 Standar Akuntansi Keuangan .....	23
2.1.1. Konsep-Konsep Pencatatan Transaksi Akuntansi .....	25
2.1.2. Posisi Keuangan Organisasi Bisnis...	32
2.2 Pengukuran Laporan Keuangan .....	34
2.3 Penyajian Laporan Keuangan.....	36
2.3.1. Neraca .....	37
2.3.2. Laporan Laba Rugi .....	42
2.3.3. Laporan Perubahan Ekuitas.....	44
2.3.4. Laporan Ekuitas .....	45
2.3.5. Catatan atas Laporan Keuangan .....	48
2.4 Kebijakan Akuntansi Organisasi Bisnis .....	49
2.5 Kebijakan Akuntansi UMKM .....	51

<b>BAB III</b>	<b>JENIS-JENIS USAHA.....</b>	<b>57</b>
3.1.	Badan Usaha.....	57
3.1.1.	Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)..	60
3.1.2.	Badan Usaha Milik Negara (BUMN).	60
3.2.	Kendala yang Sering Dihadapi Pengusaha dalam Menjalankan Bisnis .....	90
3.3.	Peran Akuntansi bagi Badan Usaha .....	93
<b>BAB IV</b>	<b>USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) 97</b>	
4.1.	Definisi Organisasi Bisnis .....	97
4.2.	Ciri dan Karakteristik UMKM .....	101
4.3.	Kendala yang Dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	107
4.4.	Peran Akuntansi bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) .....	115
<b>BAB V</b>	<b>PEMBAHASAN PENELITIAN.....</b>	<b>119</b>
5.1.	Pendahuluan.....	119
5.2.	Kerangka Pemikiran .....	122
5.3.	Metode .....	126
5.3.1.	Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .....	126
5.3.2.	Cara Cara Menentukan Ukuran Sampel.....	126
5.3.3.	Jenis dan Sumber Data .....	127
5.3.4.	Teknik Pengumpulan Data .....	128
5.3.5.	Teknik Analisis Data .....	128
5.4.	Hasil dan Pembahasan.....	135
5.4.1.	Uji Validitas.....	135
5.4.2.	Uji Reliabilitas .....	136
5.4.3.	Statistik Deskriptif.....	137
5.4.4.	Uji Normalitas .....	138
5.4.5.	Uji Multikolinearitas .....	139
5.4.6.	Uji Autokorelasi.....	139
5.4.7.	Analisis Regresi Linear Berganda.....	140
5.4.8.	Pengaruh Kualitas Laporan	

Keuangan terhadap Kinerja UMKM.....	141
5.4.9. Koefisien Determinasi.....	142
5.5. Kesimpulan.....	144
5.5.1. Kualitas Laporan Keuangan .....	144
5.5.2. SAK EMKM .....	145
5.5.3. Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja .....	146
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>147</b>

# **BAB I**

## **LAPORAN KEUANGAN**

### **1.1. Pendahuluan**

Tujuan utama didirikannya suatu organisasi adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham atau nilai perusahaan dalam jangka pendek. Guna mengetahui apakah tujuan tersebut terpenuhi atau tidak, maka dibutuhkan suatu cara untuk menilai hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan mengukur kinerja keuangan menggunakan laporan keuangan. Selain memiliki nilai penting dalam mengukur perkembangan organisasi, laporan keuangan juga digunakan untuk mengetahui prestasi yang telah dicapai di masa lampau, saat ini, dan sebagai alat pengambilan keputusan lebih lanjut bagi pihak-pihak tertentu untuk membuat perencanaan di masa mendatang (Merchant dan Stede, 2017:55).

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016:2) merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi



keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa laporan keuangan dibuat sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap, dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepada manajemen. Menurut Harahap (2015:117) "Laporan keuangan adalah suatu alat dengan mana informasi di kumpulkan dan di proses dalam akuntansi keuangan yang mengkomunikasikan secara periodik kepada para pemakainya". Pemakai laporan keuangan meliputi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditur, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya dan masyarakat.

Manajemen perusahaan memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen dan keuangan tambahan yang membantu dalam melaksanakan tanggung jawab perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

Laporan keuangan disusun dan disajikan minimal sekali dalam setahun untuk memenuhi sejumlah besar pemakai. Beberapa diantara pemakai ini memerlukan dan berhak untuk memperoleh informasi tambahan disamping yang tercakup di dalam laporan keuangan. Namun demikian, banyak para pemakai yang hanya tergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan. Oleh karena itu laporan keuangan tersebut seharusnya disusun dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka.

## 1.2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai ingin melihat apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

Ikatan Akuntan Indonesia (2016:4) yang menulis tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- b. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum

menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

- c. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat mengambil keputusan ekonomi; keputusan ini mungkin mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

### **1.3. Jenis-Jenis Laporan Keuangan**

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Bagi para analisa, laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No 1 (parg 7) laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini :

- a. Neraca
- b. Laporan laba-rugi
- c. Laporan perubahan ekuitas
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan

#### a. Neraca (*Balance Sheet*)

Dalam literatur akuntansi, neraca diterjemahkan dari istilah *balance sheet*, *statement of financial position*, *statement of financial condition* atau *statement of resources and liabilities*. Djarwanto (2015:15) mendefinisikan “neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva (*assets*), utang (*liabilities*), dan modal sendiri (*owner’s equity*) dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya pada saat tutup buku yakni pada akhir bulan, akhir triwulan atau akhir tahun”.

Pos-pos perkiraan neraca harus disajikan sesuai dengan ketentuan dan pengelompokan yang lazim yaitu sebagai berikut:

- 1) Aktiva dikelompokkan berdasarkan urutan likuiditas atau kelancaran aktiva tersebut.
- 2) Kewajiban dikelompokkan berdasarkan urutan jatuh tempo
- 3) Modal dikelompokkan berdasarkan kekekalannya atau sifat permanennya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016:1.12), informasi yang disajikan dalam neraca adalah sebagai berikut:

Neraca, minimal mencakup pos-pos berikut

- 1) Aktiva berwujud
- 2) Aktiva tidak berwujud
- 3) Aktiva keuangan
- 4) Investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas
- 5) Persediaan
- 6) Piutang usaha dan piutang lainnya
- 7) Kas dan setara kas
- 8) Utang usaha dan utang lainnya
- 9) Kewajiban yang diestimasi
- 10) Kewajiban berbunga jangka panjang

11) Hak minoritas

12) Modal saham dan pos ekuitas lainnya

b. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Laporan laba rugi adalah suatu daftar ikhtisar hasil dan biaya suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Dengan membandingkan penghasilan selama jangka waktu tertentu dengan biaya selama jangka waktu itu maka akan diketahui besarnya laba atau rugi yang disebut sebagai hasil usaha. Tujuan penyusunan laporan laba rugi ini untuk mengukur kemampuan atau perkembangan perusahaan dalam menjalankan fungsinya sehubungan dengan sifat kegiatan perusahaan.

Ikatan Akuntan Indonesia (2016:1.14), informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut :

Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan
- 2) Laba rugi usaha
- 3) Beban pinjaman
- 4) Bagian dari laba rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlukan dengan menggunakan metode ekuitas
- 5) Beban pajak
- 6) Laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan
- 7) Pos luar biasa
- 8) Hak minoritas dan
- 9) Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan

### c. Laporan Ekuitas

Ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan sedemikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Pada pokoknya, pengungkapan unsur ekuitas diharapkan secara jelas mengelompokkan modal disetor, saldo laba, selisih penilaian kembali aktiva tetap, dan modal sumbangan. Rincian tiap kelompok diperkenankan, selama tidak bertentangan dengan standar akuntansi keuangan.

### d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu (biasanya satu tahun buku). Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.

Laporan arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai perusahaan.

### e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau bagian integral dari suatu laporan keuangan perusahaan. Alasannya adalah karena laporan keuangan itu sendiri singkat dan padat, sebab itu tidak

mungkin menyajikan semua informasi penting yang berhubungan dengan suatu rekening tertentu. Oleh sebab itu penjelasan yang tidak bisa diringkas dijelaskan secara lebih terperinci pada catatan atas laporan keuangan yang merupakan penjelasan tertulis mengenai aspek-aspek penting.

#### **1.4. Karakteristik Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi penggunaannya. Ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai disebut dengan sifat atau karakteristik kualitatif. Sifat kualitatif laporan keuangan tersebut di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan, dan 4) dapat dipahami. (IAI, 2016).

Rini dan Wahiddatul (2010:2) mengutip Hanafi dan Halim (2003) mengemukakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan mencerminkan kualitas laporan keuangan yang mana di dalamnya mengandung lima karakteristik, yaitu: a) dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan; b) relevan, karena disajikan tepat waktu, memiliki nilai umpan balik dan nilai prediksi; c) dapat diandalkan/reliabel, artinya bersifat netral dan representatif; d) dapat diperbandingkan, karena adanya konsistensi data yang disajikan; dan e) secara material manfaatnya lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan.

Ikatan Akuntan Indonesia (2016:13) menyebutkan bahwa laporan keuangan harus dapat membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil pengguna, serta mampu merepresentasikan fenomena ekonomik dalam kata dan angka. Untuk itu suatu informasi keuangan harus memenuhi

karakteristik kualitatif fundamental dan kualitatif peningkat. Karakteristik kualitatif fundamental terdiri dari Relevan dan Representasi Tepat, sedangkan karakteristik kualitatif peningkat terdiri dari Dapat Dibandingkan, Dapat Diverifikasi, Tepat Waktu dan Dapat Dipahami. Karakteristik kualitatif fundamental bertujuan meningkatkan kegunaan informasi yang relevan dan direpresentasikan secara tepat, sedangkan karakteristik kualitatif peningkat bertujuan membantu menentukan mana yang harus digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena, jika keduanya dianggap sama-sama relevan dan direpresentasikan dengan tepat. Untuk dapat dikatakan berguna, informasi dalam laporan keuangan harus relevan dan direpresentasikan dengan tepat. Laporan keuangan haruslah memenuhi beberapa karakteristik berikut:

a. Relevan

Relevan dapat diartikan sebagai bersangkut-paut; berguna secara langsung (KKBI) suatu laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang ada dalam laporan keuangan haruslah relevan dengan kebutuhan penggunanya untuk bisa dijadikan dasar proses pengambilan keputusan.

Dalam hal ini, karakteristik laporan keuangan berisi evaluasi mengenai tiap transaksi bisnis selama satu periode akuntansi.



b. Materialitas

Salah satu karakteristik laporan keuangan berdasarkan SAK adalah materialitas artinya yaitu besarnya nilai informasi akuntansi yang jika salah saji atau hilang, mungkin dapat mengubah dan mempengaruhi pembuatan keputusan.

c. Keandalan

Informasi pada laporan keuangan haruslah berkualitas andal, dalam artian tidak menyesatkan, bebas dari kesalahan material, serta menyajikan hal yang tulus dan jujur. Untuk itu, proses penyusunan laporan keuangan mesti dilakukan berdasarkan pedoman, standar, dan peraturan yang baku.

d. Dapat Dipahami

Karakteristik laporan keuangan yang baik selanjutnya adalah dapat dipahami. Pastinya, laporan keuangan yang sulit dimengerti pengguna akan menghambat proses pengambilan keputusan. Untuk itu, semua informasi dalam laporan keuangan harus bisa dipahami oleh penggunanya, tidak hanya pihak manajemen saja. Meskipun begitu, pengguna diasumsikan mempunyai ilmu yang memadai mengenai kegiatan serta lingkungan operasi entitas pelaporan. Selain itu, pengguna juga diharapkan memiliki kemauan untuk mempelajari informasi yang dimaksudkan dalam laporan keuangan. Dengan membuat laporan keuangan yang bisa dipahami, maka manfaat pembuatannya pun tercapai karena dapat membantu proses pengambilan keputusan.

e. Disajikan dengan Jujur

Biasanya, banyak laporan keuangan disajikan dengan lebih-lebihkan data daripada yang seharusnya. Nah, hal ini harus dihindari. Sebab, Informasi dalam laporan

keuangan yang tidak disajikan dengan jujur tentunya akan menghasilkan risiko atau dampak negatif. Oleh karena itu, penyajian secara jujur merupakan salah satu karakteristik laporan keuangan yang harus diterapkan.

f. Netral

Karakteristik laporan keuangan yang harus diterapkan selanjutnya adalah netralitas informasi di dalamnya karena laporan keuangan dibuat untuk kebutuhan umum, maka informasi yang ada di dalamnya pun tidak boleh berpihak pada keinginan pihak tertentu.

g. Disusun dengan Pertimbangan yang Sehat

Informasi dalam laporan keuangan harus disusun dengan pertimbangan yang sehat dan penuh kehati-hatian. Oleh karena itu, informasi di dalamnya harus memiliki manfaat untuk menghadapi adanya suatu kondisi tertentu atau ketidakpastian ekonomi, seperti ketertagihan piutang yang diragukan. Jadi, aset atau pendapatan yang ditetapkan dalam laporan keuangan tidak ditulis terlalu tinggi. Selain itu, kewajiban juga tidak dibuat terlalu rendah. Meskipun begitu, penggunaan pertimbangan yang sehat juga bukan berarti memperbolehkan penetapan aset atau pendapatan terlalu rendah dan kewajiban terlampaui tinggi. Sebab jika begitu, informasi dalam laporan keuangan nantinya menjadi tidak netral dan tak dapat diandalkan.

h. Penyajian Informasi Lengkap

Karakteristik laporan keuangan haruslah berisi informasi yang lengkap, mencakup harta, utang, modal, pendapatan, kewajiban, serta beban perusahaan. Jika informasi dalam laporan keuangan disajikan secara lengkap, maka isinya pun dapat diandalkan untuk menjadi dasar pengambilan keputusan yang penting. Informasi yang sekiranya akan

dibutuhkan pengguna ataupun pembaca laporan keuangan bisa diletakkan pada bagian lembar muka atau catatan.

i. Dapat Dibandingkan

Agar bisa mengevaluasi kinerja suatu perusahaan, salah satu karakteristik laporan keuangan untuk dipenuhi adalah isinya yang dapat dibandingkan dengan entitas pelaporan lain pada umumnya. Oleh karena itu, pedoman, sistem, serta kebijakan prinsip dasar akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan haruslah sama. Kebijakan prinsip dasar akuntansi bisa saja mengalami perubahan. Namun, perubahan tersebut haruslah lebih baik dari kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan. Selain itu, laporan keuangan yang baik juga harus bisa dibandingkan dari tahun ke tahun. Jadi, laporan keuangan perlu disajikan dalam dua periode.

j. Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Karakteristik laporan keuangan yang baik terakhir adalah substansi mengungguli bentuk formal. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010, substansi mengungguli bentuk formal berarti laporan keuangan disajikan dengan memuat informasi atau peristiwa yang wajar sesuai substansi dan realitas ekonomi. Jika ada penyajian informasi yang inkonsisten atau tidak sama dengan aspek formalitasnya, maka hal itu perlu diutarakan secara jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

## **1.5. Manfaat Laporan Keuangan**

Berdasarkan pihak-pihak pengguna, ada dua manfaat laporan keuangan yaitu manfaat internal dan eksternal.

a. Manfaat internal dari hasil interpretasi laporan keuangan dapat berupa tingkat

- b. kesehatan keuangan perusahaan untuk pemilik perusahaan dibandingkan perusahaan pesaing, efektivitas manajemen dalam pengoperasian dan lain sebagainya.
- c. Manfaat eksternal dari hasil interpretasi laporan keuangan misalnya bagi investor, untuk membantu pengambilan keputusan, untuk menanam atau menarik modalnya pada perusahaan, sedangkan bagi kreditur untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam hal pemberian pinjaman pada perusahaan.

### **1.6. Pengguna Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan komoditi yang bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, karena ia dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para penggunanya dalam dunia bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan. Dengan membaca laporan keuangan dengan tepat maka seseorang dapat melakukan tindakan ekonomi menyangkut lembaga perusahaan yang dilaporkan dan diharapkan akan menghasilkan keuntungan baginya.

Menurut Harahap (2015:121), pengguna laporan keuangan itu adalah sebagai berikut:

#### **a. Pemegang Saham**

Pemegang saham ingin mengetahui kondisi keuangan perusahaan, *asset*, utang, modal, hasil, biaya dan laba. Ia juga ingin melihat prestasi perusahaan dalam pengelolaan manajemen yang diberikan amanah. Ia juga ingin mengetahui jumlah dividen yang akan diterima, jumlah pendapatan per saham, jumlah laba yang ditahan. Juga mengetahui perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, perbandingan dengan usaha sejenis, dan perusahaan lainnya. Dari informasi ini pemegang saham

dapat mengambil keputusan apakah ia akan mempertahankan sahamnya, menjual atau menambahnya. Semua tergantung pada kesimpulan yang diambilnya dari informasi yang terdapat dalam laporan keuangan atau informasi tambahan lainnya.

b. Investor

Investor dalam hal tertentu juga sama seperti pemegang saham. Bagi investor potensial ia akan melihat kemungkinan potensi keuntungan yang akan diperoleh dari perusahaan yang dilaporkan.

c. Analisa Pasar Modal

Analisa pasar modal selalu melakukan analisa tajam dan *go public* maupun yang berpotensi masuk pasar modal. Ia ingin mengetahui nilai perusahaan, kekuatan dan posisi keuangan perusahaan. Apakah layak disarankan untuk dibeli sahamnya, dijual atau dipertahankan. Informasi ini akan disampaikan kepada langganannya berupa investor baik individual maupun lembaga.

d. Manajer

Manajer ingin mengetahui situasi ekonomi perusahaan yang dipimpinnya. Seorang manajer selalu dihadapkan kepada seribu satu masalah yang memerlukan keputusan cepat dan setiap saat. Untuk sampai pada keputusan yang tepat maka ia harus mengetahui selengkap-lengkapnya kondisi keuangan perusahaan baik posisi semua pos neraca (*asset*, utang, modal), laba rugi, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, *break even*, laba kotor dan sebagainya. Karena beragamnya informasi yang dibutuhkannya ini maka akuntansi keuangan yang bersifat umum (*general purpose*) terasa sangat sedikit sehingga ia harus mengharapkan informasi yang didesain dari akuntansi manajemen.

e. Karyawan dan Serikat Pekerja

Karyawan perlu mengetahui kondisi keuangan perusahaan untuk menetapkan apakah ia masih terus bekerja di situ atau pindah. Ia juga perlu mengetahui hasil usaha perusahaan supaya ia bisa menilai apakah penghasilan (*renumerasi*) yang diterimanya adil atau tidak. Ia juga ingin mengetahui jumlah modal yang dimiliki pengusaha jika memang ada seperti dalam perusahaan penerbitan di Indonesia. Demikian juga tentang cadangan dana pensiun, asuransi kesehatan, asuransi atau jaminan sosial tenaga kerja (*jamsostek*) di negara yang demokratis dan hak-hak karyawan yang dilindungi. Informasi seperti ini sangat penting.

f. Instansi Pajak

Perusahaan selalu memiliki kewajiban pajak baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pembangunan, Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBm), Pajak Daerah, Retribusi, Pajak Penghasilan (PPh). Perusahaan juga dikenakan pemotongan, penghitungan dan pembayarannya. Semua kewajiban pajak ini mestinya akan tergambar dalam laporan keuangan, dengan demikian instansi pajak (*fiskus*) dalam hal ini dapat menggunakan laporan keuangan sebagai dasar menentukan kebenaran perhitungan pajak, pembayaran pajak, pemotongan pajak, restitusi dan juga untuk dasar penindakan.

g. Pemberi Dana (Kreditur)

Sama dengan pemegang saham investor, lender seperti bank, *Investment fund*, perusahaan leasing, juga ingin mengetahui informasi tentang situasi dan kondisi perusahaan baik yang sudah diberi pinjaman maupun yang akan diberi pinjaman. Bagi yang sudah diberikan laporan keuangan dapat menyajikan informasi tentang penggunaan dana yang diberikan, kondisi keuangan seperti likuiditas,

solvabilitas dan rentabilitas perusahaan. Bagi perusahaan calon debitur laporan keuangan dapat menjadi sumber informasi untuk menilai kelayakan perusahaan untuk menerima kredit yang akan diluncurkan.

h. *Supplier*

*Supplier* hampir sama dengan kreditur. Laporan keuangan bisa menjadi informasi untuk mengetahui apakah perusahaan layak diberikan fasilitas kredit, seberapa lama akan diberikan, dan sejauh mana potensi resiko yang dimiliki perusahaan.

i. Pemerintah atau Lembaga Pengatur Resmi

Pemerintah atau lembaga pengatur sangat membutuhkan laporan keuangan.

Karena ia ingin mengetahui apakah perusahaan telah mengikuti peraturan yang telah ditetapkannya. Misalnya Bank Indonesia telah menetapkan beberapa peraturan yang harus dilaksanakan bank misalnya tentang *Reserve Requirement (RR)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *LDR (Loan to Deposit Ratio)* dan lain sebagainya. Informasi ini dapat dibaca dari laporan keuangan. Demikian juga Bapepam yang memiliki aturan laporan perusahaan asuransi. Laporan keuangan dapat memberikan informasi apakah perusahaan telah menaati standar laporan yang ditetapkan atau belum. Jika belum maka lembaga ini dapat memberikan teguran atau sanksinya.

j. Langgan atau Lembaga Konsumen

Langgan dalam era modern seperti sekarang ini khususnya di negara maju benar-benar raja. Dengan konsep ekonomi pasar dan ekonomi persaingan konsumen sangat diuntungkan. Ia berhak mendapat layanan memuaskan (*satisfaction guarantee*) dengan harga *equilibrium*, dalam kondisi ini konsumen terlindungi dari

kemungkinan praktek yang merugikan baik dari segi kualitas, kuantitas, harga dan lain sebagainya. Biasanya lembaga khusus yang membantu memantau kepentingan konsumen ini adalah lembaga konsumen, bisa juga dalam hal makanan halal Majelis Ulama. Sebaiknya laporan keuangan juga menyajikan tentang ini.

k. Lembaga Swadaya Masyarakat

Banyak jenis lembaga swadaya masyarakat (LSM). Untuk LSM tertentu bisa saja memerlukan laporan keuangan misalnya LSM yang bergerak melindungi konsumen, lingkungan, serikat pekerja. LSM seperti ini membutuhkan laporan keuangan untuk menilai sejauh mana perusahaan merugikan pihak tertentu yang dilindunginya.

l. Peneliti/Akademisi/Lembaga Peringkat

Bagi peneliti maupun akademisi laporan keuangan sangat penting, sebagai data primer dalam melakukan penelitian terhadap topik tertentu yang berkaitan dengan laporan keuangan atau perusahaan. Laporan keuangan menjadi bahan dasar yang diolah untuk mengambil kesimpulan dari suatu hipotesa atau penelitian yang dilakukan.

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan biasa yang disusun dalam bentuk *general purpose* biasanya tidak akan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan pihak-pihak tersebut. Oleh karena itu perlunya analisa laporan keuangan. Dengan analisa laporan keuangan maka informasi yang ada dalam laporan keuangan akan menjadi lebih luas, lebih akurat sehingga menambah daya guna laporan keuangan yang lazim.



## **1.7. Kualitas Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (IAI, 2015). Menurut Rosdiana (2011) kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Laporan keuangan yang berkualitas berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan dilihat dari seberapa jauh dan lengkapnya catatan keuangan yang disiapkan sampai membentuk laporan keuangan, kedisiplinan dalam mencatat setiap transaksi (tidak ada transaksi yang terlewatkan dari catatan akuntansi), komponen laporan keuangan dan standar akuntansi yang dipakai.

## **1.8. Pentingnya Laporan Keuangan**

Kinerja perusahaan dapat diukur dan dinilai melalui laporan keuangan. Dengan mengemban peran penting bagi perusahaan, laporan keuangan yang berkualitas seharusnya diungkapkan sesuai fakta serta terhindar dari rekayasa (Wicaksono dan Yuyetta, 2013:51). Dengan karakteristik kualitatif yaitu andal, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Apabila laporan keuangan tidak mencakup karakteristik tersebut maka kurang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan yang tidak memiliki pengetahuan akuntansi. Tujuan menyusun laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia ialah memberikan informasi sebenarnya mengenai kinerja perusahaan, posisi keuangan serta perubahannya yang berguna bagi pemakai laporan keuangan sebagai alat untuk

mengambil keputusan. Keputusan yang diambil oleh pemakai laporan keuangan berdasarkan analisis terhadap informasi yang disajikan oleh laporan keuangan.

Perlunya pelaporan keuangan oleh manajemen kepada pemegang saham dijelaskan dalam *agency theory*. Menurut Simanjuntak (2014:53) teori keagenan membahas hubungan antara manajemen dan pemegang saham, dimana yang dimaksud *principal* adalah pemegang saham dan *agent* adalah manajemen pengelola perusahaan. *Principal* menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan, dilain pihak manajemen mempunyai kewajiban untuk mengelola apa yang diamanahkan pemegang saham kepadanya. Agen diwajibkan memberikan laporan periodik pada prinsipal tentang usaha yang dijalankannya. Prinsipal akan menilai kinerja agennya melalui laporan keuangan yang disampaikan kepadanya. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan sarana akuntabilitas manajemen kepada pemiliknya.

Fokus utama informasi laporan keuangan yang sering menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba (Mulyadi, 2016:14). Laba historis membantu memprediksi keadaan perusahaan, mengatur efisiensi manajemen, pendistribusian dividen mendatang dan acuan bagi pengambilan keputusan ekonomis dimasa depan. Kecenderungan para pemakai laporan keuangan yang selalu mengacu terhadap laba memungkinkan manajemen melakukan tindak kecurangan dengan cara manipulasi laba atau manajemen laba dengan tujuan menghasilkan laba yang dianggap normal bagi perusahaan (Bartov, 1993), Healy dan Wahlen(1999) mengungkapkan manajemen laba terjadi saat manajemen memakai pendapatnya atas laporan keuangan dan penyusunan transaksi guna untuk mengubah informasi laporan keuangan menjadi

menyesatkan bagi pemakai laporan keuangan. Kegiatan menurunkan maupun menaikkan laba lewat manajemen laba baik dengan cara yang tidak sesuai atau sesuai dengan asas akuntansi yang berlaku disebut dengan agresivitas pelaporan keuangan.

Agresivitas laporan keuangan dan manajemen laba membuat potensi missal lokasi sumber daya yang menyebabkan persepsi salah bagi pemakai laporan keuangan mengenai kinerja perusahaan. Laporan keuangan sebagai dasar bagi pemakai (investor, kreditor) untuk menilai kinerja perusahaan. Dalam laporan keuangan mengandung informasi laba bersih perusahaan yang digunakan sebagai pertimbangan bagi investor untuk mengambil keputusan ekonomis. Apabila laporan keuangan yang dihasilkan menunjukkan adanya manajemen laba maka laporan keuangan tidak memenuhi syarat *reliable* dimana mengandung kesalahan material, menyesatkan, dan tidak dapat diandalkan karena penyajian tidak jujur (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016). Kondisi ini dapat menjadikan kualitas laporan keuangan menurun. Jika kualitas laporan keuangan menurun, maka tingkat daya saing efisiensi investasi secara internasional menurun, dan sebaliknya artinya, kualitas laporan keuangan yang semakin rendah akan menaikkan asimetri informasi yang digunakan untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kualitas laporan keuangan yang ada di Indonesia.

### **1.9. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan**

Kualitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Istilah ini banyak digunakan dalam dalam bisnis, rekayasa, dan manufaktur dalam kaitannya dengan

teknik dan konsep untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Menurut Mulyana (2014:96) “Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan”.

Bastian (2013:94-96) menyatakan bahwa kualitas keuangan dapat diukur berdasarkan karakteristik diantaranya: 1) dapat dipahami, 2) relevan, 3) materialitas, 4) keandalan/reliabilitas, 5) penyajian jujur, 6) substansi mengungguli bentuk, 7) netralitas, 8) pertimbangan sehat, 9) kelengkapan, dan 10) dapat dibandingkan. Untuk Menyusun laporan keuangan yang berkualitas maka penggunaan system informasi manajemen sangat disarankan untuk mengurangi ketidaktelitian dan tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan.

Rudiantoro dan Siregar (2012:11) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa hal yang diduga dapat mempengaruhi persepsi pengusaha terkait pentingnya pembukuan/akuntansi dan pelaporan keuangan bagi tumbuh dan berkembangnya usaha seperti jenjang pendidikan terakhir, latar belakang pendidikan, ukuran usaha, serta lama usaha berdiri. Berikut penjelasan masing-masing yang mempengaruhi perpepsi tersebut;

1. Jenjang Pendidikan, dalam undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, Bab IV Pasal 14 yang menyatakan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi. Jenis pendidikan tersebut mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keaga maan, dan khusus. Jalur jenjang dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

2. Latar belakang pendidikan, UU sisdiknas tahun 2003 juga menjelaskan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2003). Latar belakang Pendidikan dimaksud adalah latar belakang pendidikan formal dalam mengambil kompetensi atau kejuruan.
3. Ukuran usaha, menurut Holmes dan Nicholls dalam Grace (2003) mendefinisikan ukuran perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat total asset, berapa jumlah karyawan yang dipekerjakan, dan berapa besar pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi.
4. Lama usaha berdiri, menurut (Murniati, 2002) lama usaha dalam hal ini adalah lamanya suatu UMKM berdiri atau umur UMKM semenjak usaha tersebut berdiri sampai pada saat penulis melakukan penelitian ini.

## **BAB II**

# **STANDAR AKUNTANSI ORGANISASI BISNIS**

### **2.1. Standar Akuntansi Keuangan**

Akuntansi merupakan bahasa untuk berbisnis. Setiap perusahaan menggunakannya untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan. Sedangkan masyarakat umum akan melihat akuntansi sebagai suatu media untuk mempertanggungjawabkan perputaran pada perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen, baik kepada intern pemilik modal maupun investor luar. Hal ini berarti bahwa banyak hal yang terkait dengan akuntansi sebagai suatu sistem yang utuh dalam sebuah perusahaan.

Praktik akuntansi bersandar pada aturan-aturan tertentu. Hukum yang mengatur bagaimana mengukur atau menilai, mengolah dan mengkomunikasikan informasi terdapat di dalam SAK, yaitu singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan dan berisi tentang prinsip akuntansi yang berlaku umum”.

Ikatan Akuntan Indonesia (2016:6) menyatakan bahwa asumsi dasar akuntansi terdiri dari dua hal berikut:

a. Kelangsungan Usaha

Suatu entitas ekonomi diasumsikan terus melakukan usahanya secara berkesinambungan tanpa maksud untuk dibubarkan, kecuali bila ada bukti sebaliknya. Perusahaan dianggap akan melanjutkan usahanya untuk waktu mendatang yang dapat diduga, tidak bermaksud atau berkepentingan dengan likuidasi atau penutupan usaha.

b. AkruaI

Pengukuran aktiva, kewajiban, beban serta perubahannya diakui pada saat terjadi, tidak pada saat

uang diterima atau dibayarkan, dicatat dan berpengaruh pada laporan keuangan pada periode berjalan.

Pada perusahaan akuntansi bermanfaat bagi mereka yang berkepentingan, keputusan yang akan diambil masing-masing pihak. Dengan demikian para pengambil keputusan harus dapat mengetahui mengenai informasi keuangan apa yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan tersebut untuk membuat keputusan.

Harahap (2015:3) menyatakan bahwa akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, utang dan modal suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu periode waktu tertentu. Akuntansi adalah suatu seni mencatat, mengklasifikasi dan meringkas data keuangan dengan cara yang berarti untuk mendapatkan informasi yang bersifat keuangan yang dibutuhkan suatu organisasi agar dapat beroperasi secara efisien, mengetahui hasil kerja selama ini dan merencanakan kegiatan ke depan agar lebih baik.

Akuntansi menghasilkan informasi yang digunakan manajer untuk menjalankan operasi perusahaan. Akuntansi juga memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja ekonomi dan kondisi perusahaan.

Akuntansi sebagai suatu fungsi penyedia jasa, memberikan informasi keuangan kuantitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan eksistensi perusahaan, untuk membantu membuat keputusan-keputusan ekonomi, yang menyangkut perusahaan tersebut.

### **2.1.1. Konsep-Konsep Pencatatan Transaksi Akuntansi**

Praktik akuntansi harus bersandar pada aturan-aturan tertentu. Hukum yang mengatur bagaimana mengukur/menilai, mengolah dan mengkomunikasikan informasi terdapat di dalam Standar Akuntansi Keuangan dan berisi tentang prinsip akuntansi yang berlaku umum. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2016:1.1), pencatatan transaksi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan didasari oleh konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Konsep Kesatuan Akuntansi (*Business Entity Concept*)
- b. Konsep Berkesinambungan
- c. Konsep Periode Akuntansi
- d. Konsep Pengukuran dalam Nilai Uang
- e. Konsep Harga Pertukaran
- f. Konsep Penetapan Beban dan Pendapatan

#### **Ad.1. Konsep Kesatuan Akuntansi (*Business Entity Concept*)**

Di dalam konsep ini mengandung pengertian untuk memisahkan harta perusahaan dan harta pemilik perusahaan. Semua setoran pemilik pada perusahaan dicatat sebagai tambahan modal untuk perusahaan sedangkan pengambilan kekayaan yang dilakukan oleh pemilik dicatat sebagai pengurangan modal melalui perkiraan prive. Karena faktor pemisahan itulah, perusahaan sebagai satu kesatuan akuntansi mempunyai beban dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keuangannya kepada pemilik atau pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **Ad.2. Konsep Berkesinambungan**

Konsep kesinambungan mengandung pengertian bahwa suatu perusahaan diasumsikan akan terus melanjutkan



usahanya dan tidak akan dibubarkan kecuali bila ada bukti-bukti sebaliknya. Contoh konsep ini adalah adanya penyajian aktiva berdasarkan harga perolehannya dan bukan berdasarkan atas nilai kontan aktiva atau nilai yang dapat direalisasi jika terjadi likuidasi

#### Ad.3.Konsep Periode Akuntansi

Akuntansi harus menerapkan konsep periode. Mengingat bahwa sebuah perusahaan akan bisa diukur tingkat kesuksesan dan keberhasilannya jika perusahaan tersebut dianggap menghentikan kegiatannya dan mencairkan semua hartanya dalam bentuk kas. Padahal dalam prakteknya sebuah perusahaan tidak boleh berhenti beroperasi hanya untuk menunggu laporan-laporan tersebut. Hal itu mendorong diterapkannya konsep periode sehingga kegiatan perusahaan dapat dibagi dalam periode-periode sehingga perkembangan usaha dapat dicatat pula secara periodik

#### Ad.4.Konsep pengukuran dalam Nilai Uang

Uang merupakan denominator umum dalam mengukur suatu aktiva dan kewajiban perusahaan beserta perubahannya, Hal itu juga dimaksudkan agar dapat memberikan dasar penafsiran yang universal untuk membaca sebuah laporan akuntansi.

#### Ad.5.Konsep Harga Pertukaran

Konsep ini mengandung pengertian bahwa setiap transaksi keuangan harus dicatat sebesar harga pertukaran transaksi tersebut. Harga pertukaran adalah jumlah uang yang diterima atau dibayarkan untuk transaksi tersebut. Misalnya jika pada tahun 1999 perusahaan membeli sebuah komputer seharga Rp 2.500.000,- maka bila tidak ada perubahan yang menyebabkan kapitalisasi biaya, pada tahun 2002 harga

komputer yang tercantum pada laporan keuangan tetap Rp 2.500.000,-.

#### Ad.6. Konsep Penetapan Beban dan Pendapatan

Konsep ini berhubungan dengan penentuan laba periodik dan posisi keuangan pada sebuah perusahaan. Penentuan laba periodik berhubungan dengan dua hal, yaitu pengakuan pendapatan dan penentuan beban. Pendapatan perhitungan berdasarkan prinsip realisasi, yaitu saat transaksi pertukaran telah terjadi.

Prinsip-prinsip serta prosedur akuntansi telah berkembang sejak beratus-ratus tahun. Akan tetapi, proses penetapan standar resmi yang ada sekarang baru dikembangkan sejak lima puluh tahun yang lalu. Karena akuntansi itu berkembang sangat cepat dengan datangnya Revolusi Industri, maka prosedur akuntansi selama ini sangat dikembangkan tanpa perdebatan maupun diskusi yang berkepanjangan.

Para akuntan mengembangkan metode-metode yang tampaknya akan memenuhi kebutuhan perusahaan mereka masing-masing, sehingga hal ini menimbulkan prosedur yang berbeda-beda di antara berbagai perusahaan dalam perlakuan akuntansi untuk aktivitas yang sama. Oleh karena itu, daya banding atau komparabilitas di antara laporan keuangan yang dihasilkan sering dipertanyakan.

Selama tahun 1920-an, perbedaan prosedur dalam perlakuan akuntansi ini mulai dirasakan menjadi suatu permasalahan hingga puncaknya pada saat ekonomi dunia, termasuk Amerika pada tahun 1929 terjerumus ke dalam *malaise* (crash). Untuk menangkal terjadinya depresi berikutnya, Presiden Franklin D. Roosevelt dengan dukungan penuh dari parlemen membentuk suatu badan (SEC = *Securities*

*and Exchange Commission*) sebagai badan yang bertanggung-jawab untuk melindungi kepentingan para investor dengan memastikan adanya ketentuan mengenai pengungkapan yang lengkap dan layak di dalam peraturan.

Hal ini lah yang menjadi “benih” mengapa diperlukan suatu standar dalam prosedur akuntansi, agar perlakuan yang sama dapat diterapkan pada aktivitas usaha yang sama, sehingga daya banding atau komparabilitas suatu laporan keuangan dapat dipertanggung-jawabkan. Di Indonesia standar ini dikenal sebagai Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga persepsi yang timbul dari pihak-pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan tersebut berdiri pada dasar asumsi yang sama. Akuntansi memiliki kerangka teori konseptual yang menjadi dasar pelaksanaan teknik-tekniknya, kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar (teknik, prinsip) dan praktek yang sudah diterima oleh umum karena kegunaannya dan kelogisannya.

Standar itu disebut Standar Akuntansi, di Indonesia berlaku Prinsip Akuntansi Indonesia kemudian diganti menjadi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia. Sedangkan di USA berlaku General Accepted Accounting Principle (GAAP), kemudian Accounting Principle Board Statement dan terakhir menjadi FASB Statements. SAK merupakan pedoman bagi siapa saja dalam menyusun laporan keuangan yang akan diterima oleh umum.

Prinsip dan konsep akuntansi dikembangkan dari hasil penelitian praktik akuntansi sehari-hari, dan pengumuman dari lembaga yang berwenang. Saat ini, *Financial Accounting Standards Board* (FASB) merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di AS dengan tugas utama mengembangkan

prinsip-prinsip akuntansi. FASB menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasinya. Tugas yang sama di Indonesia diemban oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan beserta kompartemen akuntan yang terkait.

Standar Akuntansi saat ini umumnya disusun oleh lembaga resmi yang diakui pemerintah, profesi, dan umum. Kalau di Indonesia yang berwenang menyusun ini adalah Komite Standar Akuntansi Keuangan yang berada dibawah naungan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). Komite Standar Akuntansi menyerahkan hasil kerjanya kepada Pengesahan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan akhirnya akan ditetapkan dan disahkan di dalam kongres IAI.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah organisasi profesi akuntan yang juga merupakan badan yang menyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia. Organisasi profesi ini terus berusaha menanggapi segala perkembangan akuntansi keuangan yang terjadi baik tingkat nasional, regional maupun global, khususnya yang mempengaruhi dunia usaha dan profesi akuntansi sendiri.

Pengembangan standar akuntansi keuangan sejak berdirinya IAI pada tahun 1958 hingga kini perkembangan standar akuntansi ini dilakukan secara terus menerus, pada tahun 1973 terbentuk Panitia Penghimpun Bahan-bahan dan Struktur GAAP. Kemudian pada tahun 1974 dibentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (Komite PAI) yang bertugas menyusun standar keuangan. Komite PAI telah bertugas selama empat periode kepengurusan IAI sejak tahun 1974 hingga 1994 dengan susunan personel yang terus diperbaharui. Selanjutnya, pada periode kepengurusan IAI tahun 1994-1998 nama komite PAI diubah menjadi Komite Standar Akuntansi Keuangan (Komite SAK), kemudian pada

kongres VIII, tanggal 23-24 September 1998 di Jakarta, komite SAK diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk masa bakti 1998-2000 dan diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan SAK.

Sejak IAI berdiri telah dihasilkan tiga Standar akuntansi keuangan sebagai berikut:

1. Pada tahun 1973 untuk pertama kalinya IAI menerbitkan suatu buku Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) yang sebagian besar merupakan terjemahan buku Paul Grady, Penerbitan ini dipicu oleh diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973.
2. Pada tahun 1984 buku Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 yang menggantikan PAI 1973 diterbitkan. Komite PAI melakukan revisi secara mendasar terhadap PAI 1973.
3. Pada tahun 1994, IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan sejak itu mengeluarkan serial Standar keuangan yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan sejak 1 Oktober 1994. Pengembangan Standar Akuntansi Ketiga ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan profesi akuntansi dalam mengikuti dan mengantisipasi perkembangan internasional. Banyak Standar yang dikeluarkan itu sesuai atau sama dengan Standar akuntansi internasional yang dikeluarkan IASC (*International Accounting Standard Commitee*).

Standar Akuntansi ini akan terus menerus berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Menurut Belkaoui yang dikutip oleh Harahap (2015:152) mengemukakan alasan pentingnya Standar Akuntansi yang berlaku sebagai berikut:

1. Dapat menyajikan informasi tentang posisi keuangan, prestasi, dan kegiatan perusahaan. Informasi yang disusun

berdasarkan standar akuntansi yang lazim diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten, terpercaya, dan dapat diperbandingkan.

2. Memberi pedoman dan peraturan bekerja bagi akuntan publik agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati, independen, dan dapat mengabdikan keahliannya dan kejujurannya melalui penyusunan laporan akuntan setelah melalui pemeriksaan akuntan.
3. Memberikan “*database*” kepada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan dan pengaturan ekonomi, dan peningkatan efisiensi ekonomi dan tujuan-tujuan makro lainnya.
4. Dapat menarik perhatian para ahli dan praktisi di bidang teori dan standar akuntansi keuangan. Semakin banyak standar yang dikeluarkan semakin banyak kontroversi dan semakin bergairah untuk berdebat, berpolemik dan melakukan penelitian.

Standar Akuntansi mencakup konversi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (*Standard Setting Body*) pada saat tertentu. Standar ini merupakan consensus pada kala itu tentang pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, hasil, biaya dan perubahannya dalam bentuk laporan keuangan. Dalam standar ini dijelaskan transaksi apa yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya, dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan disajikan.

Standar akuntansi keuangan merupakan masalah penting dalam profesi dan semua pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu mekanisme penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak

yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Dalam penyusunan standar akuntansi keuangan ini ada 3 (tiga) kemungkinan:

- a. Diserahkan sepenuhnya kepada kekuatan pasar
- b. Diserahkan kepada swasta/profesi atau
- c. Diserahkan kepada pemerintah.

### **2.1.2. Posisi Keuangan Organisasi Bisnis**

Laporan posisi keuangan atau disebut juga *statement of financial position* merupakan istilah lain yang sering digunakan untuk menyatakan *balance sheet*. Seperti yang sudah diketahui, laporan ini mencakup kondisi harta (aset), kewajiban, dan modal pada waktu tertentu. Informasi dalam *statement of financial position* dapat dimanfaatkan untuk berbagai analisis keuangan. Misalnya, membandingkan utang dengan kondisi harta atau aset saat ini.

Laporan posisi keuangan adalah laporan yang terkait posisi keuangan perusahaan dan bersifat sistematis. Laporan ini berlaku untuk berbagai jenis perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur.

Secara singkat, laporan posisi keuangan dapat diartikan sebagai ringkasan dari kondisi aset, liabilitas, serta ekuitas sebuah bisnis atau perusahaan. Dalam suatu kondisi tertentu, *statements of financial position* juga sering disebut dengan neraca atau *balance sheet*.

Informasi-informasi yang dicantumkan di dalam neraca dikenal dengan sebutan akun. Tiap-tiap akun akan diurutkan berdasarkan likuiditasnya. Jadi, nomor urut awal akan menunjukkan berbagai kelompok akun yang paling likuid, lalu disusul dengan tingkat likuiditas yang lebih rendah, berurut sampai yang paling tidak likuid.

Unsur-unsur yang terdapat dalam posisi laporan keuangan terdiri dari :

1. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas.
2. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
3. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

Adapun fungsi laporan posisi keuangan:

- a. Mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu

Laporan ini mewakili posisi keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu. Umumnya, waktu yang dimaksud adalah hari terakhir dari periode pelaporan. Dari laporan ini, kamu bisa memiliki pemahaman tentang kesehatan keuangan bisnis pada tanggal tertentu. Sebagai contoh, kamu menutup periode akuntansi pada 31 Juli 2021. Kondisi utang, aktiva, dan modal dari bisnis yang kamu jalankan dapat dilihat melalui *statement of financial position* pada tanggal tersebut.

- b. Dasar untuk membuat kebijakan strategis.

Dengan mengetahui kondisi unsur-unsur keuangan yang ada di neraca, kamu bisa membuat pertimbangan tertentu bagi bisnis. Data ini sangat berharga supaya kamu dapat menghasilkan kebijakan strategis untuk operasional bisnis. Sering kali, *balance sheet* membantu tim manajemen suatu bisnis untuk melacak posisi keuangan perusahaan dan mengambil langkah-langkah perbaikan. Harapannya,



performa keuangan perusahaan bisa lebih baik pada periode berikutnya.

- c. Membantu investor dan *stake holder* lain melakukan analisis

Selain menjadi dasar pertimbangan manajemen, informasi yang terkandung dalam laporan tersebut membantu investor dan pemangku kepentingan lainnya seperti pemegang saham dan pemerintah untuk menganalisis keuangan perusahaan. Tentunya, analisis ini menjadi dasar pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, investor juga dapat membandingkan laporan posisi keuangan akhir tahun dengan laporan tahun sebelumnya untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan yang terjadi. Angka-angka dalam laporan tersebut dapat memberi mereka pemahaman tentang bagaimana kinerja perusahaan. Neraca perusahaan juga dapat dibandingkan dengan perusahaan lain yang bekerja di industri serupa dalam rangka mengetahui apakah perusahaan mempunyai performa lebih baik dari perusahaan lain.

## **2.2. Pengukuran Laporan Keuangan**

Akuntansi sebagai sumber informasi keuangan menggunakan satuan uang sebagai alat denominasi unsur-unsur yang dilaporkan di laporan keuangan. Pengukuran (measurement) unsur neraca dan laporan laba rugi menggunakan beberapa dasar pengukuran tertentu, yaitu biaya historis, biaya kini, nilai realisasi/penyelesaian, nilai sekarang, dan nilai wajar. Langsung saja kita bahas satu persatu dasar pengukurannya yah

### **1. Nilai Historis (*Historical Cost*)**

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang

diberikan, untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang timbul sebagai penukar dari kewajiban (*obligation*), atau, dalam keadaan tertentu (misalnya pajak penghasilan) sejumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.

## **2. Biaya Kini (*Current Cost*)**

Aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar, bila aset yang sama atau setara aset tersebut diperoleh sekarang. Liabilitas dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.

## **3. Nilai Realisasi/Penyelesaian (*Realizable/Settlement Value*)**

Aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (*orderly disposal*). Liabilitas dinyatakan sebesar nilai penyelesaian; yaitu, jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

## **4. Nilai Sekarang (*Present Value*)**

Aset dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih dimasa depan, yang didiskontokan (*discounted*) ke nilai sekarang (*present value*) dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Liabilitas dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih di masa depan, yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Biaya historis adalah dasar

pengukuran yang lazimnya digunakan. Kadang-kadang biaya historis digunakan dengan membandingkan dengan dasar pengukuran lain, misalnya dalam penilaian persediaan. Nilai persediaan kadang – kadang dinilai dengan metode nilai terendah antara biaya historis atau nilai realisasi bersih (*lower of cost or net realizable value*). Akuntansi dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan nilai wajar (*fair value*).

### **5. Nilai Wajar (*Fair Value*)**

Perkembangan standar akuntansi keuangan berbasis IFRS terakhir telah memperkenalkan konsep nilai wajar (*fair value*). IFRS 13 Fair Value Measurement mengatur mengenai nilai wajar yang juga telah diadopsi untuk PSAK 68 Pengukuran Nilai Wajar.

### **2.3. Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Bagi para analisa, laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No 1 laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini :

- a. Neraca
- b. Laporan laba-rugi
- c. Laporan perubahan ekuitas
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan

### 2.3.1. Neraca

Dalam literatur akuntansi, neraca diterjemahkan dari istilah *balance sheet*, *statement of financial position*, *statement of financial condition* atau *statement of resources and liabilities*. Djarwanto (2013:15) mendefinisikan “neraca adalah suatu laporan yang sistematis tentang aktiva (*assets*), utang (*liabilities*), dan modal sendiri (*owner’s equity*) dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Biasanya pada saat tutup buku yakni pada akhir bulan, akhir triwulan atau akhir tahun”.

Pos-pos perkiraan neraca harus disajikan sesuai dengan ketentuan dan pengelompokan yang lazim yaitu sebagai berikut :

- 1) Aktiva dikelompokkan berdasarkan urutan likuiditas atau kelancaran aktiva tersebut.
- 2) Kewajiban dikelompokkan berdasarkan urutan jatuh tempo.
- 3) Modal dikelompokkan berdasarkan kekekalannya atau sifat permanennya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (Standar Akuntansi Keuangan, 2016:1.12), informasi yang disajikan dalam neraca adalah sebagai berikut :

Neraca, minimal mencakup pos-pos berikut :

- 1) Aktiva berwujud
- 2) Aktiva tidak berwujud
- 3) Aktiva keuangan
- 4) Investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas
- 5) Persediaan
- 6) Piutang usaha dan piutang lainnya
- 7) Kas dan setara kas
- 8) Utang usaha dan utang lainnya
- 9) Kewajiban yang diestimasi
- 10) Kewajiban berbunga jangka panjang
- 11) Hak minoritas

## 12) Modal saham dan pos ekuitas lainnya

Di dalam neraca terdiri dari tiga bagian utama yaitu aktiva, utang dan modal.

### a. Aktiva

Dalam pengertian aktiva tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang belum dialokasikan (*deffered charges*) atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta aktiva yang tidak berwujud lainnya (*intangible assets*) misalnya *goodwill*, hak paten, hak menerbitkan dan sebagainya.

Pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasi menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicarikan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau di konsumen dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Yang termasuk kelompok aktiva lancar adalah :

- 1). Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Yang termasuk dalam pengertian kas adalah cek yang diterima dari para langganan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau *demand deposit* yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali (dengan menggunakan cek atau bilyet giro) setiap saat diperlukan oleh perusahaan.
- 2). Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau *marketable securities*) adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi.

- 3). Piutang wesel adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang.
- 4). Piutang dagang adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit.
- 5). Persediaan (untuk perusahaan dagang) adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual.
- 6). Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa atau prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya sehingga merupakan tagihan.
- 7). Persekot atau biaya yang dibayar dimuka adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa atau prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa/prestasi ini melainkan pada periode berikutnya.

Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah :

- 1). Investasi jangka panjang adalah investasi perusahaan dimana investasi ini berasal dari kekayaan atau modal perusahaan yang tidak terpakai atau di luar usaha pokok perusahaan.
- 2). Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya konkrit, digunakan dalam operasi perusahaan dan bersifat permanen (umur kegunaannya panjang atau tidak akan habis dipakai dalam satu periode kegiatan perusahaan).

- 3). Aktiva tetap tidak berwujud adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak konkrit tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.
- 4). Beban yang ditanggihkan adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya. Misalnya biaya pemasaran, diskon obligasi, biaya penelitian, dan lain sebagainya.
- 5). Aktiva lain-lain adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya, misalnya gedung dalam proses, penyelesaian piutang jangka panjang, dan sebagainya.

## **b. Utang**

Utang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana utang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Utang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam utang lancar (utang jangka pendek) dan utang jangka panjang.

Utang lancar atau utang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Utang lancar meliputi antara lain :

- 1). Utang dagang adalah utang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit.

- 2). Utang wesel adalah utang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan Undang-Undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
- 3). Utang pajak baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara.
- 4). Biaya yang masih harus dibayar adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
- 5). Utang jangka panjang yang segera jatuh tempo adalah sebagian (seluruh) utang jangka panjang yang sudah menjadi utang jangka pendek karena harus segera dilakukan pembayarannya.
- 6). Penghasilan yang diterima dimuka adalah penerimaan untuk penjualan barang atau jasa yang belum direalisasi.

Utang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca), meliputi :

- 1). Utang obligasi.
- 2). Utang hipotik adalah utang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu.
- 3). Pinjaman jangka panjang yang lain.

### **c. Modal**

Modal merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), *surplus* dan laba ditahan atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh utang-utangnya.

Bentuk atau susunan neraca tidak ada keseragaman di antara perusahaan-perusahaan tergantung pada tujuan-tujuan



yang akan dicapai, tetapi bentuk neraca yang umum digunakan adalah sebagai berikut :

- a). Bentuk skontro (*account form*) dimana semua aktiva tercantum sebelah kiri atau debet dan utang serta modal tercantum disebelah kanan atau kredit.
- b). Bentuk vertikal (*report form*), dalam bentuk lini semua aktiva nampak di bagian atas yang selanjutnya dengan utang jangka pendek, utang jangka panjang serta modal.
- c). Bentuk neraca yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisi keuangan perusahaan, bentuk ini bertujuan agar kedudukan atau posisi keuangan yang dikehendaki nampak dengan jelas, misalnya besarnya modal kerja neto (*net working capital*) atau jumlah modal perusahaan.

### **2.3.2. Laporan Laba Rugi**

Laporan laba rugi adalah suatu daftar ikhtisar hasil dan biaya suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Dengan membandingkan penghasilan selama jangka waktu tertentu dengan biaya selama jangka waktu itu maka akan diketahui besarnya laba atau rugi yang disebut sebagai hasil usaha. Tujuan penyusunan laporan laba rugi ini untuk mengukur kemampuan atau perkembangan perusahaan dalam menjalankan fungsinya sehubungan dengan sifat kegiatan perusahaan.

Ikatan Akuntan Indonesia (Standar Akuntansi Keuangan:1.14), informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut :

Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut :

- a. Pendapatan

- b. Laba rugi usaha
- c. Beban pinjaman
- d. Bagian dari laba rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlukan dengan menggunakan metode ekuitas
- e. Beban pajak
- f. Laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan
- g. Pos luar biasa
- h. Hak minoritas dan
- i. Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, laba rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Prinsip-prinsip umum yang diterapkan dalam penyusunan laporan laba rugi adalah sebagai berikut :

- 1) Bagian yang pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan (penjualan barang dagangan atau memberikan *service*) diikuti dengan harga pokok dari barang atau *service* yang dijual sehingga diperoleh laba kotor.
- 2) Bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operasional yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya umum atau administrasi (*operating expenses*).
- 3) Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh di luar operasi pokok perusahaan yang diikuti dengan biaya-biaya yang terjadi di luar usaha pokok perusahaan (*non operating* atau *financial income* dan *expenses*).
- 4) Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi yang insidental (*extra ordinary gain or loss*) sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak penghasilan.

Bentuk dari laporan laba rugi yang umum digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Bentuk *single step* yaitu dengan menggabungkan semua penghasilan menjadi satu kelompok dan semua biaya dalam satu kelompok, sehingga untuk menghitung laba atau rugi bersih hanya memerlukan satu langkah yaitu mengurangkan total biaya terhadap total penghasilan.
- b. Bentuk *multiple step* dilakukan dengan pengelompokan yang lebih teliti sesuai dengan prinsip yang digunakan secara umum.

### 2.3.3. Laporan Ekuitas

Ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada, dan dengan sedemikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Pada pokoknya, pengungkapan unsur ekuitas diharapkan secara jelas mengelompokkan modal disetor, saldo laba, selisih penilaian kembali aktiva tetap, dan modal sumbangan. Rincian tiap kelompok diperkenankan, selama tidak bertentangan dengan standar akuntansi keuangan.

Laporan ekuitas pemilik melaporkan perubahan ekuitas pemilik selama jangka waktu tertentu. Laporan tersebut dipersiapkan setelah laporan laba rugi, karena laba bersih atau rugi bersih periode berjalan harus dilaporkan dalam laporan ekuitas ini. Demikian juga, laporan ekuitas pemilik dibuat sebelum mempersiapkan neraca karena jumlah ekuitas pemilik pada akhir periode harus dilaporkan di neraca. Oleh karena itu, laporan ekuitas pemilik seringkali dipandang sebagai penghubung antara laporan laba rugi dengan neraca.

Laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (Standar Akuntansi Keuangan, 2016:1.17) menunjukkan :

- a. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan.

- b. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait secara langsung dalam ekuitas.
- c. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkait.
- d. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik.
- e. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya dan
- f. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, *agio* dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan. Laporan perubahan ekuitas kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan selama periode yang bersangkutan.

#### **2.3.4. Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas merupakan ringkasan dari penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan selama periode tertentu (biasanya satu tahun buku). Laporan arus kas dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah

serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang. Laporan arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dari berbagai perusahaan.

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Aktivitas operasi adalah jumlah arus kas yang berasal dari kegiatan operasi menurut indikator yang menentukan apakah dari operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain berguna dalam memprediksi arus kas operasi masa depan. Beberapa contoh arus kas dari kegiatan operasi menurut Ikatan Akuntan Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016:2.4) adalah :

- a. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa.
- b. Penerimaan kas dari *royalty, fees*, komisi dan pendapatan lain.
- c. Pembayaran kas kepada karyawan.
- d. Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan premium klaim, anuitas, dan manfaat asuransi lainnya.
- e. Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak penghasilan kecuali dapat diidentifikasi secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi.

f. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk tujuan transaksi dan perdagangan.

Laporan arus kas yang diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi perlu dilakukan sebab arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi menurut Ikatan Akuntan Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016:2.5) adalah :

- a. Pembayaran kas untuk membeli aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan aktiva jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aktiva tetap yang dibangun sendiri.
- b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva tak berwujud dan aktiva jangka panjang lain.
- c. Perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain.
- d. Uang muka pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan).
- e. Pembayaran kas sehubungan dengan *futures contracts*, *forward contracts*, *option contracts*, dan *swap contracts* kecuali apabila kontrak tersebut dilakukan untuk tujuan perdagangan (*dealing or trading*), atau apabila pembayaran tersebut diklasifikasi sebagai aktivitas pendanaan.

Laporan arus kas yang diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan perlu dilakukan prediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan menurut

Ikatan Akuntan Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016:2.5) adalah :

- a. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya.
- b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham perusahaan.
- c. Penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek dan pinjaman lainnya.
- d. Pelunasan pinjaman.
- e. Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (*lesse*) untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa guna pembiayaan (*financial lease*).

### **2.3.5. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau bagian integral dari suatu laporan keuangan perusahaan. Alasannya adalah karena laporan keuangan itu sendiri singkat dan padat, sebab itu tidak mungkin menyajikan semua informasi penting yang berhubungan dengan suatu rekening tertentu. Oleh sebab itu penjelasan yang tidak bisa diringkas dijelaskan secara lebih terperinci pada catatan atas laporan keuangan yang merupakan penjelasan tertulis mengenai aspek-aspek penting.

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016:1.17) mengungkapkan :

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.

- b. Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.
- c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

#### **2.4. Kebijakan Akuntansi Organisasi Bisnis**

Kebijakan adalah pola-pola perilaku yang telah ditentukan terlebih dahulu, yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan suatu instansi. Dalam proses kegiatan prinsip dan persyaratan dari suatu kebijakan adalah:

- a. Kebijakan itu harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis dalam pedoman atau bentuk publikasi lainnya.
- b. Kebijakan harus dikomunikasikan secara sistematis pada semua pejabat dan pegawai organisasi yang bertugas mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan instansi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Kebijakan harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Kebijakan harus disusun sedemikian rupa agar dapat mendorong pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara efektif, efisien, ekonomis serta menciptakan jaminan bahwa sumber-sumber daya milik instansi tersebut berada dan terjaga dengan selayaknya.
- e. Kebijakan harus direview kembali secara berkala dan harus direvisi untuk disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya yang selalu berubah-ubah. Sedangkan akuntansi merupakan metode pengendalian finansial yang



penting terhadap kegiatan-kegiatan dan sumber-sumber daya suatu entitas. Akuntansi memberikan suatu kerangka kerja yang dapat disesuaikan untuk penetapan tanggung jawab pada bidang-bidang kegiatan tertentu, dan pada waktu yang bersamaan memberikan dasar pelaporan sebagai suatu sarana untuk menilai operasi.

Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) memiliki tujuan agar laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan memiliki informasi dengan kualitas sangat bagus dan dapat diperbandingkan. Dengan dijadikannya IFRS sebagai pedoman pelaporan keuangan secara global, maka akan mengurangi terjadinya asimetri informasi dan akan meningkatkan investasi lintas negara. Namun, IFRS dikritik karena ada juga fleksibilitas di banyak bidang standar dimana lebih dari satu perlakuan akuntansi diperbolehkan. Oleh karena itu, manajer perusahaan memiliki kesempatan untuk menggunakan kebijakan akuntansi tertentu agar dapat menguntungkan perusahaan atau menguntungkan manajer.

Fleksibilitas kebijaksanaan manajerial yang terdapat pada IFRS memungkinkan bagi manajer perusahaan memilih menerapkan kebijakan akuntansi yang menguntungkan. Karena alasan oportunistik tersebut, kebijakan akuntansi yang dipilih manajer dapat menimbulkan terjadinya manajemen laba. Dengan fleksibilitas tersebut, manajer dapat memilih untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang meningkatkan pendapatan atau menurunkan pendapatan perusahaan.

Kebijakan akuntansi dapat diartikan sebagai aturan, prinsip dan metode akuntansi yang dipilih oleh manajer dari sebuah entitas yang digunakan pihak manajemen sebagai panduan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan perusahaan. Kebijakan akuntansi akun menjelaskan hal-hal

terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan. Manajer perusahaan akan menerapkan kebijakan akuntansi yang memberikan keuntungan untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga dapat menimbulkan terjadinya manajemen laba. Manajemen laba dapat terjadi karena manajer dan para pembuat laporan keuangan berharap akan mendapatkan manfaat dari tindakan yang dilakukannya.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan bertujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut kebijakan akuntansi menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan *cash basic* atau *accrual basis*. Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, berpedoman pada standar akuntansi.

Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun masih diperlukan laporan non keuangan untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

## **2.5. Kebijakan Akuntansi UMKM**

Standar Akuntansi Keuangan entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM) disusun berdasarkan kebutuhan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Undang-Undang

yang relevan sebagai referensi untuk definisi, kriteria, dan rentang kuantitatif mencakup entitas mikro, kecil, dan menengah termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (UU 20/2008) Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bab I pasal 3 yang menyatakan bahwa, Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah perusahaan ekonomi produktif yang mandiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikendalikan, atau menjadi bagian secara langsung atau tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Rentang kuantitatif seperti dijelaskan dalam pasal 6 dalam “UU No 20 Tahun 2008”, bahwa kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Kecil: memiliki aset bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) antara Rp50.000.000 dan Rp500.000.000 atau memiliki penjualan tahunan antara Rp300.000.000 hingga Rp2.500.000.000;
- b. Usaha Menengah: memiliki aset bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) antara Rp500.000.000 dan Rp10.000.000.000 atau memiliki penjualan tahunan antara Rp2.500.000.000 dan Rp50.000.000.000.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas mikro, kecil, dan menengah (EMKM) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya- tidaknya selama

dua tahun berturut-turut. SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria dalam paragraf 1.2, jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk Menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterapkan oleh entitas kecil dan menengah. Akan tetapi, mengetahui kebutuhan standar akuntansi yang lebih sederhana dari SAK umum berbasis IFRS dan SAK ETAP karena keterbatasan sumber daya manusia pada entitas mikro kecil dan menengah. SAK EMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana dari SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM dengan pengukuran yang murni menggunakan biaya historis. SAK EMKM diharapkan bisa membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan sehingga memudahkan pelaku UMKM mendapatkan akses pendanaan dari lembaga keuangan (SAK EMKM, 2016). Dasar untuk mengukur unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis.

Biaya historis suatu aset sama dengan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk mendapatkan aset pada saat akuisisi. Biaya historis dari liabilitas adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam menjalankan bisnis normal. Pengakuan unsur-unsur laporan keuangan adalah proses pembentukan pos dalam laporan keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi kriteria :

- a. Manfaat ekonomik yang terkait dengan aset, liabilitas, penghasilan dan beban dapat dipastikan akan mengalir masuk atau keluar dari entitas.

- b. Pos-pos ini memiliki biaya yang terukur dan dapat diandalkan. Pengungkapan diperlukan jika kepatuhan terhadap persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak cukup bagi pengguna untuk memahami efek transaksi, peristiwa dan kondisi lainnya pada posisi keuangan dan kinerja entitas.

Penyajian laporan keuangan yang adil membutuhkan entitas untuk menyajikan informasi yang relevan, perwakilan yang sesuai, komparabilitas dan pemahaman. Entitas menyajikan secara lengkap dan relevan dalam laporan keuangan pada akhir periode pelaporan. Laporan keuangan UMKM yang diatur dalam SAK EMKM minimal terdiri dari :

1. Laporan Posisi Keuangan Pada Akhir Periode Informasi tentang posisi keuangan suatu entitas terdiri dari informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Unsur-unsur ini didefinisikan sebagai berikut menurut (SAK EMKM, 2016):
  - a. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa di masa lalu dan yang dari manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan diperoleh entitas.
  - b. Liabilitas adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu dimana resolusinya menghasilkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
  - c. Ekuitas adalah hak residual atas asset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.  
Laporan posisi keuangan entitas mencakup pos-pos berikut : a) Kas dan setara kas; b) Piutang; c) Persediaan; d) Asset tetap; e) Utang usaha; f) Utang bank; g) Ekuitas.

2. Laporan Laba Rugi Selama Periode Informasi kinerja entitas terdiri dari informasi tentang pendapatan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi.
  - a. Penghasilan adalah penambahan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi investor.
  - b. Beban adalah pengurangan kemampuan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau peningkatan kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada investor.

Laporan laba rugi entitas dapat mencakup pos-pos sebagai berikut: a) Pendapatan; b) Beban keuangan; c) Beban pajak.
3. Catatan atas Laporan Keuangan yang Berisi Tambahan dan Rincian Pos-pos Tertentu yang Relevan. Catatan untuk laporan keuangan meliputi:
  - a. Pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM;
  - b. Ringkasan kebijakan akuntansi;
  - c. Informasi tambahan dan penjelasan tentang pos-pos khusus yang menjelaskan transaksi dan materi penting sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk membahas laporan keuangan.

Laporan keuangan UMKM yang diatur dalam SAK EMKM hanya perlu menyajikan ketiga hal di atas, UMKM diperbolehkan untuk menyajikan laporan keuangan lainnya jika diperlukan, misalnya Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan keuangan yang lengkap yang

dimaksud pada SAK EMKM berarti entitas menyajikan minimum 2 periode berturut-turut untuk laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait

# **BAB III**

## **JENIS-JENIS USAHA**

### **3.1. Badan Usaha**

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Seringkali pengertian badan usaha tertukar dengan perusahaan padahal keduanya cukup berbeda. Sebagian orang yang belum mengetahui pengertian badan usaha terkadang masih menyamakan dengan perusahaan. Di Indonesia sendiri terdapat beragam jenis badan usaha di antaranya Perseroan Terbatas (PT), Perum atau *Commanditer Vennootschap* (CV), yang dikelompokkan berdasarkan lapangan usaha dan kepemilikan modal. Untuk membedakan antara badan usaha dengan perusahaan bisa dilihat berdasarkan langkah awal yang dilakukan ketika mendirikannya. Biasanya badan usaha akan menentukan jenis usahanya terlebih dahulu. Sedangkan perusahaan akan langsung melakukan perencanaan bisnis dan penetapan ide. Secara perinci, perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis formal sedangkan perusahaan diartikan sebagai kesatuan teknis produksi
- b. Badan usaha memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan sedangkan perusahaan memiliki tujuan menghasilkan barang dan jasa
- c. Badan usaha bersifat resmi atau formal. Berbeda dengan perusahaan yang sifatnya bisa resmi atau tidak
- d. Badan usaha bersifat abstrak, bisa dilihat dari akta pendirian. Sedangkan perusahaan bersifat konkrit artinya ada kegiatannya.



- e. Contoh badan usaha seperti *Commanditer Vennootschap* (CV), Firma, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan lainnya. Sedangkan perusahaan ialah pabrik, restoran, toko, kios, kantor dan lainnya.

Perbedaan lainnya adalah, jika badan usaha merupakan lembaga, perusahaan merupakan sebuah tempat di mana badan usaha mengelola sejumlah faktor produksi. Jadi, badan usaha memiliki ruang lingkup yang jauh lebih besar karena bisa memiliki satu hingga beberapa perusahaan. Singkatnya, perusahaan merupakan bagian dari badan usaha yang menghasilkan barang dan jasa, badan usaha adalah kesatuan yuridis ekonomis karena berbadan hukum dan terdiri atas sumber daya alam, modal dan tenaga kerja. Sedangkan perusahaan kesatuan teknis dan produksi.

Pengertian badan usaha menurut para ahli untuk memahami lebih jelas mengenai apa itu badan usaha sehingga mampu membedakannya dengan perusahaan, berikut ini adalah ulasan singkat mengenai beberapa pengertian badan usaha menurut para ahli, dilansir mengutip dari majoo.id.

- a. Menurut Molengraff

Badan usaha adalah sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan bersifat keluar, untuk mendapatkan penghasilan dengan melakukan kegiatan produksi di dalamnya. Hasil dari produksi itu kemudian diperdagangkan secara bebas kepada masyarakat.

- b. Dominick Salvatore

Badan usaha sebagai suatu organisasi yang mengombinasikan dan mengordinasikan beragam asal daya. Tujuannya untuk menghasilkan, membentuk barang atau jasa yang kemudian dijual kepada konsumen atau masyarakat secara luas.

- c. Menurut M. Echols

Badan usaha adalah sebuah usaha yang bentuknya badan usaha dengan orientasi mendapatkan keuntungan yang besar dari kegiatan yang dilakukan di dalamnya. M. Echols menekankan badan usaha memiliki orientasi pada keuntungan.

Adapun jenis-jenis badan usaha terdiri dari :

- a. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
  - 1) Perusahaan Perseorangan
  - 2) Persekutuan Firma
  - 3) Perseroan Komanditer (*Commanditer Vennootschap CV*)
  - 4) Perseroan Terbatas
  - 5) Yayasan
- b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- c. Koperasi

Sebelum pembahasan lebih lanjut mengenai badan usaha, di sini akan di bahas terlebih dahulu mengenai perusahaan. Adapun beberapa pertimbangan yang perlu dilakukan dalam memilih bentuk perusahaan :

- 1) Jenis usaha yang dijalankan (perdagangan, industri, dan sebagainya)
- 2) Ruang lingkup usaha
- 3) Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha
- 4) Besarnya resiko pemilikan
- 5) Batas-batas pertanggungjawaban terhadap utang-utang perusahaan
- 6) Besarnya investasi yang ditanamkan
- 7) Cara pembagian keuntungan
- 8) Jangka waktu berdirinya perusahaan
- 9) Peraturan-peraturan pemerintahan

Menurut UU no. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 huruf b yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis

usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Sedangkan pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh orang lain menjalankan perusahaan. Pengusaha mengeluarkan sejumlah modal yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Dalam hal ini terdapat 3 (tiga) kategori pengusaha :

- 1) Pengusaha yang bekerja sendiri
- 2) Pengusaha yang bekerja dengan bantuan pekerja
- 3) Pengusaha yang memberi kuasa kepada orang lain untuk menjalankan perusahaan.

### **3.1.1. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)**

BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta adalah badan usaha yang dimiliki oleh swasta. Badan usaha ini sepenuhnya dikelola dan permodalannya dari pihak swasta. Berikut dijelaskan beberapa jenis BUMS yang ada di Indonesia.

#### **3.1.1.1. Perusahaan Perseorangan**

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang, dimana pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, tetapi ia juga menanggung semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan.

Pendirian perusahaan perseorangan tidak diatur dalam KUHD dan tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh satu orang pengusaha saja.

Ciri dan sifat perusahaan perseorangan :

- a. Relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan
- b. Tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi

- c. Tidak ada pajak, yang ada adalah pungutan dan retribusi
- d. Seluruh keuntungan dinikmati sendiri
- e. Sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri
- f. Keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar
- g. Jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup
- h. Sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan

Perusahaan perseorangan dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

1) Usaha Perseorangan Berizin

Memiliki izin operasional dari departemen teknis. Misalnya bila perusahaan perseorangan bergerak dalam bidang perdagangan, maka dapat memiliki izin seperti Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

2) Usaha Perseorangan Yang Tidak Memiliki Izin

Misalnya usaha perseorangan yang dilakukan para pedagang kaki lima, toko barang kelontong, dsb.

Adapun kebaikan perusahaan perseorangan yaitu :

- a) Mudah dibentuk dan dibubarkan
- b) Bekerja dengan sederhana
- c) Pengelolaannya sederhana
- d) Tidak perlu kebijaksanaan pembagian laba

Sedangkan kelemahan perusahaan perseorangan yaitu :

- a) Tanggung jawab tidak terbatas
- b) Kemampuan manajemen terbatas
- c) Sulit mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan
- d) Sumber dana hanya terbatas pada pemilik
- e) Resiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri

### **3.1.1.2. Perusahaan Persekutuan Bukan Badan Hukum**

Perusahaan persekutuan bukan badan hukum yaitu perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerja sama tapi tidak termasuk dalam kategori badan usaha yang berbadan hukum. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Firma dan Persekutuan Komanditer (CV).

#### **3.1.1.2.1. Firma**

Firma (dari bahasa Belanda *venootschap onder firma*; secara harfiah: perserikatan dagang antara beberapa perusahaan) atau sering juga disebut Fa, adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama. Pemilik firma terdiri dari beberapa orang yang bersekutu dan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan.

Firma adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Dalam firma semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya baik sendiri-sendiri maupun bersama terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lain. Bila perusahaan mengalami kerugian akan ditanggung bersama, kalau perlu dengan seluruh kekayaan pribadi mereka.

Firma harus didirikan dengan akta otentik yang dibuat di muka notaris. Akta Pendirian Firma harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Firma yang bersangkutan. Setelah itu akta pendirian harus diumumkan dalam Berita Negara atau Tambahan Berita Negara. Tetapi karena Firma bukan merupakan badan hukum, maka akta pendirian Firma tidak memerlukan pengesahan dari Departemen Kehakiman RI.

Pendirian, pengaturan dan pembubaran Firma diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Firma bukan merupakan badan usaha yang berbadan hukum karena :

- a. Tidak ada pemisahan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu-sekutu, setiap sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.
- b. Tidak ada keharusan pengesahan akta pendirian oleh Menteri Kehakiman dan HAM

Firma berakhir apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Selain itu, menurut Pasal 26 dan Pasal 31 KUHD Firma juga dapat bubar sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu.

Ciri dan sifat firma :

- a. Apabila terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi.
- b. Setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin
- c. Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya.
- d. keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup
- e. seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma
- f. pendiriannya tidak memerlukan akte pendirian
- g. mudah memperoleh kredit usaha

Adapun kelebihan firma yaitu :

- 1) Prosedur pendirian relatif mudah
- 2) Mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar, karena gabungan modal yang dimiliki beberapa orang
- 3) Keputusan bersama dengan pertimbangan seluruh anggota firma, sehingga keputusan-keputusan menjadi lebih baik

Sedangkan kelemahan firma yaitu :

- 1) Utang-utang perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma

2) Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab bila salah seorang anggota keluar, maka firma pun bubar

### **3.1.1.2.2. Perseroan Komanditer / CV**

Persekutuan Komanditer / CV adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang (sekutu) yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Para anggota persekutuan menyerahkan uangnya sebagai modal perseroan dengan jumlah yang tidak perlu sama sebagai tanda keikutsertaan di dalam persekutuan.

Dalam KUH Dagang tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran, maupun pengumumannya, sehingga persekutuan komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja (Pasal 22 KUH Dagang). Dalam praktik di Indonesia untuk mendirikan persekutuan komanditer dengan dibuatkan akta pendirian/berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Dengan kata lain prosedur pendiriannya sama dengan prosedur mendirikan persekutuan firma.

Ciri dan sifat CV :

- a. Sulit untuk menarik modal yang telah disetor
- b. Modal besar karena didirikan banyak pihak
- c. Mudah mendapatkan kredit pinjaman
- d. Ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas dan ada yang pasif tinggal menunggu keuntungan
- e. Relatif mudah untuk didirikan
- f. Kelangsungan hidup perusahaan cv tidak menentu

Sekutu pada persero dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Sekutu Komplementer yaitu: sekutu aktif / orang yang bersedia memimpin pengaturan perusahaan dan

bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya sesuai pasal 18 KUHD.

- b. Sekutu Komanditer yaitu: sekutu pasif / orang yang tidak ikut mengurus persekutuan tapi mempercayakan uangnya dalam persekutuan dan bertanggung jawab hanya terbatas pada kekayaan yang diikuti sertakan dalam perusahaan tersebut.

Berdasarkan perkembangannya, bentuk perseroan komanditer adalah sebagai berikut:

- a. Persekutuan komanditer murni

Bentuk ini merupakan persekutuan komanditer yang pertama. Dalam persekutuan ini hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan yang lainnya adalah sekutu komanditer.

- b. Persekutuan komanditer campuran

Bentuk ini umumnya berasal dari bentuk firma bila firma membutuhkan tambahan modal. Sekutu firma menjadi sekutu komplementer sedangkan sekutu lain atau sekutu tambahan menhadui sekutu komanditer.

- c. Persekutuan komanditer bersaham

Persekutuan komanditer bentuk ini mengeluarkan saham yang tidak dapat diperjualbelikan dan sekutu komplementer maupun sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih. Tujuan dikeluarkannya saham ini adalah untuk menghindari terjadinya modal beku karena dalam persekutuan komanditer tidak mudah untuk menarik kembali modal yang telah disetorkan.

Berakhirnya CV, diatur dalam Pasal 31 KUHD yaitu :

- a. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (Akta Pendirian).
- b. CV berakhir sebelum jangka waktu yang ditetapkan, akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu.



c. Akibat perubahan anggaran dasar (akta pendirian) di mana perubahan anggaran dasar ini mempengaruhi kepentingan pihak ketiga terhadap CV.

Adapun kebaikan perseroan komanditer yaitu :

- 1) Pendiriannya relatif mudah
- 2) Modal yang dapat dikumpulkan lebih banyak
- 3) Kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar
- 4) Manajemen dapat didiversifikasikan
- 5) Kesempatan untuk berkembang lebih besar

Sedangkan kelemahan peseroan komanditer yaitu :

- 1) Tanggung jawab tidak terbatas
- 2) Kelangsungan hidup tidak terjamin
- 3) Sukar untuk menarik kembali investasinya

### **3.1.1.3. Perusahaan Berbadan Hukum**

Badan Hukum adalah organisasi yang diwujudkan / diciptakan oleh hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Karena itu badan hukum dapat mempunyai kekayaan sendiri, utang piutang sendiri, dapat digugat dan menggugat. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum setelah akta pendirian badan hukum tersebut mendapat pengesahan dari pemerintah / Departemen Kehakiman. Yang termasuk dalam kelompok perusahaan berbadan hukum adalah Perseoran Terbatas, Koperasi, Yayasan dan BUMN.

#### **3.1.1.3.1. Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap (NV)*, adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang

dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas.

Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.

Menurut Pasal 1 butir 1 UU no. 1 tahun 1995, Perseroan Terbatas adalah badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan terbatas adalah suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak serta kewajiban para pendiri maupun pemilik. Akta pendirian perusahaan harus mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman. Selain

itu terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi para pemegang saham dengan bagian kekayaan yang disetor ke perseroan dalam bentuk setoran saham. Tanda keikutsertaan seseorang sebagai pemilik adalah saham yang dimilikinya. Makin besar saham yang dimiliki, makin besar peran dan kedudukan seseorang sebagai pemilik perusahaan tersebut. Tanggung jawab seorang pemegang saham terhadap pihak ketiga terbatas pada modal sahamnya. Jadi tanggung jawab pemilik terhadap kewajiban-kewajiban finansial perusahaan ditentukan oleh besarnya modal yang diikutsertakan pada perseroan. (Hal ini yang berbeda dengan CV/Firma). Kekayaan pribadi para pemegang saham maupun milik para pimpinan perusahaan tidak dipertanggungjawabkan sebagai jaminan terhadap utang-utang perusahaan. Keterlibatan dan tanggung jawab para pemilik terhadap utang piutang perusahaan terbatas pada saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas mempunyai kelangsungan hidup yang panjang, karena meski pendiri atau pemiliknya meninggal dunia perseroan ini akan tetap berjalan.

Ciri dan sifat perseorangan terbatas yaitu :

- a. Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi
- b. Modal dan ukuran perusahaan besar
- c. Kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik saham
- d. Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham
- e. Kepemilikan mudah berpindah tangan
- f. Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai
- g. Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen
- h. Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham

- i. Sulit untuk membubarkan PT
- j. Pajak berganda pada pajak penghasilan / PPh dan pajak deviden

Unsur-unsur dalam Perseroan Terbatas adalah :

1). Organisasi yang teratur

Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. RUPS terdiri dari RUPS tahunan yang diadakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku dan RUPS lainnya yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- b) Direksi adalah organ PT yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan dan tujuan PT serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- c) Komisaris adalah organ PT yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

2). Kekayaan sendiri Persero

Kekayaan sendiri Persero memiliki kekayaan sendiri berupa modal yang disetor para pemegang sahamnya dan terbagi dalam 3 kelompok modal yaitu Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor.

Modal Dasar merupakan jumlah keseluruhan modal dalam bentuk saham dari suatu perseroan terbatas. Menurut Pasal 26 UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), jumlah modal dasar suatu perseroan minimal Rp. 25.000.000,- kecuali untuk usaha-usaha tertentu yang

mensyaratkan modal dasar di atas Rp. 25.000.000,- contoh pendirian usaha bank.

Modal yang ditempatkan, merupakan sejumlah modal tertentu yang disanggupi oleh para pendiri perseroan terbatas untuk disetorkan ke dalam perseroan, minimal 25 % dari seluruh jumlah modal dasar.

Modal yang disetor, merupakan modal yang telah disetor oleh para pendiri PT, minimum sebesar 50% dari modal yang ditempatkan atau 12,5% dari modal dasar peseroan.

### 3).Melakukan hubungan hukum sendiri

Diwakili oleh Direksi untuk melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga dengan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Sebelum Akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman RI, para pendiri bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan-tindakan persero terbatas tersebut.
- b) Setelah akta pendirian disahkan namun belum diumumkan dalam Berita Negara RI, Dewan Direktur bertanggung jawab secara tanggung renteng atas tindakan-tindakan perseroan terbatas tersebut (Pasal 23 UU PT)
- c) Setelah akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara RI, maka perseroan terbatas tersebut yang akan bertanggung jawab atas seluruh tindakannya.

### 4). Mempunyai tujuan sendiri yaitu memperoleh keuntungan (laba).

Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas yaitu :

- a. Pembuatan akta pendirian di muka notaris; membawa rancangan AD dan ART.
- b. Pengesahan oleh Menteri Kehakiman untuk pengesahan status sebagai badan hukum.

- c. Pendaftaran perseroan yang dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah kerjanya meliputi tempat perseroan didirikan. Pendaftaran wajib dilakukan dalam waktu 30 hari setelah pengesahan / persetujuan Menteri Kehakiman diberikan.
- d. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara, wajib dilakukan permohonan pengumuman oleh direksi dalam waktu 30 hari sejak pendaftaran

Jenis - Jenis Perseroan Terbatas :

- 1) Perseroan Terbatas / PT Tertutup  
PT tertutup adalah perseroan terbatas yang saham perusahaannya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah ditentukan dan tidak menerima pemodal dari luar secara sembarangan. Umumnya jenis PT ini adalah PT keluarga atau kerabat atau saham yang di kertasnya sudah tertulis nama pemilik saham yang tidak mudah untuk dipindahtanggankan ke orang atau pihak lain.
- 2) Perseroan Terbatas / PT Terbuka  
PT terbuka adalah jenis PT di mana saham-saham perusahaan tersebut boleh dibeli dan dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali sehingga sangat mudah untuk diperjual belikan ke masyarakat. Pada umumnya saham PT terbuka kepemilikannya atas unjuk, bukan atas nama sehingga tak sulit menjual maupun membeli saham PT terbuka tersebut.
- 3) Perseroan Terbatas / PT Domestik  
PT domestik adalah PT yang berdiri dan menjalankan kegiatan operasional di dalam negeri sesuai aturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- 4) Perseroan Terbatas / PT Asing  
PT asing adalah PT yang didirikan di negara lain dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara tempat PT itu

didirikan. Namun pemerintah telah menetapkan bahwa setiap perusahaan atau pemodal asing yang ingin berbisnis dan beroperasi di dalam negeri berbentuk PT yang taat dan tunduk terhadap aturan dan hukum yang ada di Indonesia.

5) Perseroan Terbatas / PT Perseorangan

PT perseorangan adalah PT yang saham yang telah dikeluarkan hanya dimiliki oleh satu orang saja. Orang yang menguasai saham tersebut juga bertindak atau menjabat sebagai direktur di perusahaan tersebut. Dengan begitu otomatis orang itu akan memiliki kekuasaan tunggal, yaitu menguasai wewenang diiktur dan juga RUPS / rapat umum pemegang saham.

6) Perseroan Terbatas / PT Umum / PT Publik

PT Publik adalah PT yang kepemilikan saham bebas oleh siapa saja dan juga terdaftar di bursa efek.

Pembagian wewenang dalam perseorangan terbatas selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Pengelolaan perusahaan dapat diserahkan kepada tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya ( profesional ). Struktur organisasi perseroan terbatas terdiri dari pemegang saham, direksi, dan komisaris. Dalam PT, para pemegang saham melimpahkan wewenangnya kepada direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan dengan tugas tersebut, direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak, dan sebagainya. Apabila terjadi kerugian yang amat besar (diatas 50%) maka direksi harus melaporkannya ke para pemegang saham dan pihak ketiga, untuk kemudian dirapatkan.

Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas kinerja jajaran direksi perusahaan. Komisaris bisa memeriksa

pembukuan, menegur direksi, memberi petunjuk, bahkan bila perlu memberhentikan direksi dengan menyelenggarakan RUPS untuk mengambil keputusan apakah direksi akan diberhentikan atau tidak. Dalam RUPS / Rapat Umum Pemegang Saham, semua pemegang saham sebesar/sekecil apapun sahamnya memiliki hak untuk mengeluarkan suaranya. Dalam RUPS sendiri dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan evaluasi kinerja dan kebijakan perusahaan yang harus dilaksanakan segera. Bila pemegang saham berhalangan, dia bisa melempar suara miliknya ke pemegang lain yang disebut *proxy*. Hasil RUPS biasanya dilimpahkan ke komisaris untuk diteruskan ke direksi untuk dijalankan. Isi RUPS terdiri dari :

- Menentukan direksi dan pengangkatan komisaris
- Memberhentikan direksi atau komisaris
- Menetapkan besar gaji direksi dan komisaris
- Mengevaluasi kinerja perusahaan
- Memutuskan rencana penambahan/pengurangan saham perusahaan
- Menentukan kebijakan perusahaan
- Mengumumkan pembagian laba (dividen)

Berakhirnya perseroan terbatas menurut Pasal 114 UU PT, Perseroan Terbatas dapat bubar karena :

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Dalam Pasal 115 UU PT ditentukan bahwa direksi dapat mengajukan usul pembubaran persero kepada RUPS. Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah bila diambil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan UU dan Anggaran Dasar.

2. Karena jangka waktu berdirinya perseroan sudah berakhir.

3. Keputusan Pengadilan Negeri karena :

- Permohonan Kejaksaan karena perseroan melanggar kepentingan umum



- Permohonan 1 orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
- Permohonan kreditur karena perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit atau kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
- Permohonan pihak berkepentingan karena adanya cacat hukum dalam akta pendirian perseroan.

Adapun kelebihan perseroan terbatas :

1) Kewajiban terbatas.

Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang "terbatas" tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini mengizinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam usaha yang beresiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.

2) Masa hidup abadi.

Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subyek disolusi dan penyebaran. Kelebihan ini juga sangat penting dalam periode pertengahan, ketika tanah disumbangkan kepada Gereja (sebuah perusahaan) yang tidak akan mengumpulkan biaya feodal yang seorang tuan tanah dapat mengklaim ketika pemilik tanah meninggal. Untuk hal ini, lihat Statute of Mortmain.

- 3) Efisiensi manajemen.  
Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- 4) Terbatasnya tanggung jawab, sehingga tidak menimbulkan resiko bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga pemilik
- 5) Saham dapat diperjual belikan dengan relatif mudah.
- 6) Kebutuhan kapital lebih besar akan mudah dipenuhi, sehingga memungkinkan perluasan usaha.
- 7) Pengelolaan perusahaan dapat dilakukan lebih efisien  
Sedangkan kelemahan perseroan terbatas yaitu :
  - 1) Kerumitan perizinan dan organisasi  
Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku.
  - 2) Biaya pendiriannya relatif mahal
  - 3) Rahasia tidak terjamin
  - 4) Kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham

### **3.1.1.3.2. Koperasi**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai

gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Berdasarkan pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu:

- a. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi;
- b. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas.

Pada Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 2016), disebutkan bahwa karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota.

Menurut UU no. 25 tahun 1992, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Status badan hukum koperasi diperoleh setelah memperoleh pengesahan dari pemerintah (Menteri Koperasi). Modal Koperasi terdiri dari :

- a. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, sumbangan suka rela, hibah dan dana cadangan Sisa Hasil Usaha.

b. Modal Pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank, penerbitan obligasi atau surat utang lainnya, sumber lain yang sah.

Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan berlandaskan Pancasila dan UUD'45.

#### a. Sejarah Berdirinya Koperasi

Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771–1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia.

Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786–1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama *The Cooperator*, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.

Koperasi akhirnya berkembang di negara-negara lainnya. Di Jerman, juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan koperasi buatan Inggris. Koperasi-koperasi di Inggris didirikan oleh Charles Foirer, Raffeinsen, dan Schulze Delitch. Di Perancis, Louis Blanc mendirikan koperasi produksi yang mengutamakan kualitas barang. Di Denmark Pastor Christiansone mendirikan koperasi pertanian.

#### b. Fungsi dan Peran Koperasi

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

c. Prinsip Koperasi :

Adapun prinsip koperasi yaitu :

- 1) Keanggotaan bersifat suka rela
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- 5) Kemandirian
- 6) Keanggotaan koperasi bersifat murni, pribadi dan tidak dapat dialihkan.

Koperasi mempunyai ciri tersendiri :

- 1) Lebih mementingkan keanggotaan dan sifat persamaan
- 2) Anggota-anggotanya bebas keluar masuk
- 3) Koperasi merupakan badan hukum yang menjalankan usaha untuk kesejahteraan anggota.
- 4) Koperasi didirikan secara tertulis dengan akte pendirian dari notaris

- 5) Tanggung jawab kelancaran usaha koperasi berada di tangan pengurus
- 6) Para anggota koperasi turut bertanggung jawab atas utang-utang koperasi terhadap pihak lain.
- 7) Kekuasaan tertinggi di dalam rapat anggota.

#### d. Gerakan Koperasi di Indonesia

Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriadmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan SDI. Belanda yang khawatir koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan, mengeluarkan UU no. 431 tahun 19 yang isinya yaitu :

- 1) Harus membayar minimal 50 gulden untuk mendirikan koperasi
- 2) Sistem usaha harus menyerupai sistem di Eropa
- 3) Harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jendral
- 4) Proposal pengajuan harus berbahasa Belanda

Hal ini menyebabkan koperasi yang ada saat itu berjatuhan karena tidak mendapatkan izin Koperasi dari Belanda. Namun setelah para tokoh Indonesia mengajukan protes, Belanda akhirnya mengeluarkan UU no. 91 pada tahun 1927, yang isinya lebih ringan dari UU no. 431 seperti :

- 1) Hanya membayar 3 gulden untuk materai
- 2) Bisa menggunakan bahasa daerah
- 3) Hukum dagang sesuai daerah masing-masing
- 4) Perizinan bisa didaerah setempat

Koperasi menjamur kembali hingga pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang

menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

e. Perangkat Organisasi Koperasi

Adapun perangkat koperasi terdiri dari :

1) Rapat Anggota

Rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu., termasuk pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian personalia pengurus dan pengawas.

2) Pengurus

Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan disertai dan disertai mandat untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi, baik dibidang organisasi maupun usaha. Anggota pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Dalam menjalankan tugasnya, pengurus bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Atas persetujuan rapat anggota pengurus dapat mengangkat manajer untuk mengelola koperasi. Namun pengurus tetap bertanggung jawab pada rapat anggota.

3) Pengawas

Pengawas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengurus.

Anggota pengawas dipilih oleh anggota koperasi di rapat anggota. Dalam pelaksanaannya, pengawas berhak mendapatkan setiap laporan pengurus, tetapi merahasiakannya kepada pihak ketiga. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota

f. Logo gerakan koperasi Indonesia



Lambang gerakan koperasi Indonesia memiliki arti sebagai berikut :

- 1) Rantai melambangkan persahabatan yang kokoh.
- 2) Roda bergigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus menerus.
- 3) Kapas dan padi berarti menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi.
- 4) Timbangan berarti keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi.
- 5) Bintang dalam perisai artinya Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi.
- 6) Pohon beringin menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh berakar.



- 7) Koperasi Indonesia menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia.
- 8) Warna merah dan putih menggambarkan sifat nasional Indonesia.

g. Sumber Modal Koperasi

Seperti halnya bentuk badan usaha yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan modal. Adapun modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri meliputi sumber modal sebagai berikut:

1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. Simpanan pokok jumlahnya sama untuk setiap anggota.

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

3) Simpanan khusus/lain-lain

- a) Simpanan sukarela simpanan yang dapat diambil kapan saja.
- b) Simpanan Qurba
- c) Deposito Berjangka

4) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

5) Hibah

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

Adapun modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak sebagai berikut:

- a) Anggota dan calon anggota
- b) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antarkoperasi
- c) Bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d) Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e) Sumber lain yang sah

h. Cara Mendirikan Koperasi :

Menurut Pasal 6 – Pasal 14 UU no. 25 tahun 1992 adalah sebagai berikut:

1) Rapat pembentukan koperasi

Sekurang-kurangnya 20 orang pendiri mengadakan rapat pembentukan koperasi, kemudian dibuatkan berita acara yang berisikan hasil kesepakatan, jumlah anggota dan nama mereka yang diberi kuasa untuk menandatangani akta pendirian.

- 2) Surat Permohonan Pengesahan kepada Departemen Koperasi  
Pengesahan dan pendaftaran akta pendirian, diberikan paling lama 3 bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Tanggal pengesahan akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi dan resmi sebagai badan hukum.
- 3) Pengiriman akta pendirian kepada pendiri
- 4) Pengumuman dalam Berita Negara

#### i. Pengelompokan Koperasi

Menurut bidang usahanya :

- 1) Koperasi Produksi adalah koperasi yang para anggotanya terdiri dari produsen penghasil barang / jasa. Koperasi ini mengusahakan kemudahan bagi para anggotanya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, seperti menyediakan bahan baku, bahan pembantu, serta perlengkapan produksi lainnya dan juga penyaluran hasil produksi kepada konsumen.
- 2) Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang bergerak dalam penyediaan kebutuhan pokok bagi anggotanya.
- 3) Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam penghimpunan dana dari para anggotanya dan meyalurkannya kepada anggota yang membutuhkannya.
- 4) Koperasi Serba Usaha adalah koperasi yang mempunyai usaha rangkap / beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan anggotanya.

Menurut luas wilayahnya, koperasi di Indonesia dikelompokkan menjadi:

- 1) Primer Koperasi adalah koperasi sebagai satuan terkecil dengan wilayah yang kecil pula dan melbatkan secara langsung orang-orang sebagai anggotanya.

- 2) Pusat Koperasi adalah koperasi yang anggota-anggotanya adalah koperasi- koperasi primer, sedikitnya lima.
- 3) Gabungan Koperasi adalah koperasi yang dibentuk secara bersama sama oleh pusat koperasi (paling sedikit tiga puluh pusat koperasi)
- 4) Induk Koperasi adalah koperasi yang dibentuk secara bersama-sama oleh gabungan koperasi (paling sedikit tiga gabungan koperasi).

j. Pihak yang terlibat dalam Koperasi :

- 1) Rapat Anggota Tahunan (RAT), yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan diadakan paling sedikit sekali dalam satu tahun. RAT menetapkan sebagai berikut :
  - a) Anggaran Dasar
  - b) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
  - c) Pemilihan, pengangkatan pemberhentian pengurus dan pengawas
  - d) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan
  - e) Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
  - f) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.
- 2) Pengurus adalah orang-orang yang secara aktif bertugas dalam pengelolaan koperasi dan memiliki jabatan paling lama 5 tahun. Sebagai imbalannya, pengurus menerima uang jasa / honorarium.
- 3) Pengawas / Dewan Komisaris yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam RAT. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan

dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

k. Pembubaran Koperasi

Menurut Pasal 46 UU no. 25 Tahun 1992, pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan :

- 1) Keputusan Rapat Anggota atau
- 2) Keputusan pemerintah bila :
  - a) Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan UU no. 25 tahun 1992.
  - b) Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.
  - c) Kelangsungan hidupnya tidak dapat diharapkan.

### **3.1.1.3.3. Yayasan**

Yayasan adalah suatu badan usaha, tetapi tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini didirikan untuk sosial dan berbadan hukum. Yayasan (Inggris: *foundation*) adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Rapat paripurna DPR pada tanggal 7 September 2004 menyetujui undang-undang ini, dan Presiden RI Megawati Soekarnoputri mengesahkannya pada tanggal 6 Oktober 2004.

Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan

pendirian yayasan dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan. Yayasan yang telah memperoleh pengesahan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus. Pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

Yayasan yang kekayaannya berasal dari negara, bantuan luar negeri atau pihak lain, atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam undang-undang, kekayaannya wajib diaudit oleh akuntan publik dan laporan tahunannya wajib diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia.

Ciri - ciri yayasan :

- a. Bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.
- b. Tidak semata-mata mengutamakan keuntungan atau mengejar/ mencari keuntungan dan/atau penghasilan yang sebesar-besarnya.
- c. Tidak mempunyai anggota.

Perbuatan hukum penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Yayasan dapat bubar karena jangka waktu yang ditetapkan Anggaran Dasar berakhir, tujuan yang ditetapkan tercapai atau tidak tercapai, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

### **3.1.2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

BUMN atau Badan Usaha Milik Negara ialah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. Status pegawai badan usaha-badan usaha tersebut adalah pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam yaitu Perjan, Perum dan Persero. Ciri-ciri BUMN

- a. Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah.
- b. Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah.
- c. Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.
- d. Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- e. Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat.
- f. Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara.
- g. Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi.

Manfaat BUMN :

- a. Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa.
- b. Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja.
- c. Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat.
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa, baik migas maupun non migas.

- e. Menghimpun dana untuk mengisi kas negara ,yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.
- f. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### **3.1.2.1. Perusahaan Jawatan (Perjan)**

Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, Sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan-perjan tersebut. Contoh Perjan: KAI (kini menjadi PT).

### **3.1.2.2. Perusahaan Umum (Perum)**

Perum adalah perjan yang sudah dirubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah *profit oriented*. Sama seperti Perjan, perum di kelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai Negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik (*go public*) dan statusnya diubah menjadi persero. Contohnya : Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri).

### **3.1.2.3. Perusahaan Perseroan (Persero)**

Persero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham.



Persero dipimpin oleh direksi. Sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT < nama perusahaan > (Persero). Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Jadi dari uraian di atas, ciri-ciri Persero adalah:

- a. Tujuan utamanya mencari laba (Komersial)
- b. Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham
- c. Dipimpin oleh direksi
- d. Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta
- e. Badan usahanya ditulis PT (nama perusahaan) (Persero)
- f. Tidak memperoleh fasilitas negara

Contoh perusahaan yang mempunyai badan usaha Persero antara lain:

- 1) PT Garuda Indonesia Airways (Persero)
- 2) PT Angkasa Pura (Persero)
- 3) PT Pertamina (Persero)
- 4) PT Tambang Bukit Asam (Persero)
- 5) PT Aneka Tambang (Persero)
- 6) PT PELNI (Persero)
- 7) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- 8) PT Pos Indonesia (Persero)
- 9) PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- 10) PT Telkom (Persero)

### **3.2. Kendala yang Sering Dihadapi Pengusaha dalam Menjalankan Bisnis**

Menjalankan suatu bisnis bukanlah perkara mudah sebab ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. Baik bisnis berskala kecil maupun besar, penting untuk memperhatikan berbagai aspek agar pengusaha dapat bertahan dan menjalankan bisnis dengan lancar.

Tidak sedikit bisnis yang gagal beroperasi akibat tidak adanya strategi yang tepat. Sebelum mencari tahu strategi dalam menjalankan bisnis, sebaiknya cari tahu dulu tantangan bisnis apa saja yang rentan dihadapi para pemilik usaha. Agar pengusaha dapat menghadapi segala rintangan saat berbisnis, berikut beberapa hal yang sering dihadapi oleh pengusaha dan bagaimana cara mengatasinya.

a. Kurang pengetahuan tentang jenis bisnis yang dijalani

Sudah sewajarnya bagi pengusaha untuk mendalami jenis bisnis sebelum mendirikan. Dengan menguliknya hingga ke akar-akarnya, pengusaha akan lebih siap untuk menjalankan bisnis tersebut. Namun sayangnya, tidak semua orang mampu menyiapkan bisnis dengan matang.

Banyak orang yang mudah terlena dengan iming-iming untung besar sehingga mengabaikan beberapa poin penting, seperti strategi pemasaran. Kurangnya pengetahuan dan trik berbisnis yang benar sering menjadi beban pikiran.

Oleh karenanya, pengusaha wajib untuk mencari tahu mengenai cara menjalankan bisnis dengan strategi yang tepat melalui seminar, koneksi, atau belajar dari para ahli. Bahkan, pengusaha juga bisa mencarinya di internet.

b. Tidak memiliki banyak waktu

Bisnis pengusaha saat ini mungkin hanya sebagai sampingan karena pengusaha memiliki pekerjaan lain yang lebih diutamakan. Mengenyampingkan bisnis seringkali menjadi penyebab suatu bisnis tidak dapat bertahan karena fokus pemiliknya terpecah.

Jika pengusaha menginginkan bisnis pengusaha berkembang pesat meski saat ini pengusaha juga bekerja, sebaiknya mulailah untuk belajar mengatur waktu atau *time management*. Dengan manajemen waktu yang baik,

pengusaha bisa tetap bekerja tanpa melupakan bisnis pengusaha.

c. Takut gagal

Dalam memulai suatu bisnis pasti ada banyak kekhawatiran yang pengusaha pikirkan dan sering kali pikiran tersebut berupa hal-hal negatif. Dengan adanya pikiran seperti ini, tidak menutup kemungkinan bila pengusaha akan semakin takut untuk mendirikan suatu bisnis.

Perlu diketahui bahwa yang namanya kegagalan pasti ada dan ini merupakan hal yang wajar dalam bisnis. Namun, bukan berarti pengusaha harus menyerah sebelum memulainya. Yakinlah dengan potensi yang pengusaha miliki serta gali pengetahuan tentang bisnis lebih dalam agar pengusaha tidak mudah menyerah pada situasi.

d. Keterbatasan modal dan perputaran uang yang tidak terukur

Tidak bisa dimungkiri bahwa semakin banyak modal yang pengusaha miliki, semakin mudah bagi pengusaha untuk menggerakkan bisnis. Namun sayangnya, banyak dari pebisnis yang mengeluhkan perputaran uang yang tidak terukur akibat ketidakmampuan dalam mengatur keuangan. Supaya perputaran modal dapat lebih terukur, sebaiknya buat rencana anggaran yang baru dengan sistem yang lebih tepat. Jika perlu, mintalah bantuan *financial expert* untuk membantu masalah keuangan bisnis.

e. Tidak ada penyesuaian digitalisasi bisnis

Sebagaimana kita tahu bahwa tren belanja saat ini adalah *online shop*. Itu artinya, masyarakat lebih memilih untuk belanja secara online daripada harus datang ke toko. Jika tidak ingin bisnis kalah saing, sebaiknya ikuti tren tersebut dan mulailah untuk menerapkan digitalisasi dalam bisnis.

Dalam hal ini, pengusaha juga perlu menerapkan strategi pemasaran digital guna membantu meningkatkan penjualan bisnis secara online. Apabila pengusaha tidak mampu menyusun strategi pemasaran digital, maka akan berdampak buruk terhadap perjalanan bisnis ke depannya.

### **3.3. Peran Akuntansi bagi Badan Usaha**

Perusahaan adalah sebuah organisasi yang memproses keahlian dan sumber daya ekonomi menjadi barang dan jasa yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan para pembeli, serta diharapkan akan memberikan laba bagi pemiliknya. Perusahaan mempunyai peranan sebagai bahan masukan bagi pimpinan perusahaan dan pihak luar yang ingin bekerjasama untuk mengevaluasi posisi keuangan, perkembangan usaha perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Di dalam masyarakat bisnis, akuntansi dikenal sebagai bahasa. Hal ini dikarenakan fungsi akuntansi yang merupakan media komunikasi di antara para pelaku bisnis dan ekonomi.

Peran akuntansi dalam suatu perusahaan dapat dinilai penting karena akuntansi dapat memberikan informasi mengenai gambaran keuangan di sebuah perusahaan. Akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi yang menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Peran mendasar akuntansi adalah sebagai penyedia informasi serta sumber jawaban untuk segala urusan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Laporan yang berisi informasi yang lengkap dan akurat dapat digunakan untuk menstabilkan bahkan meningkatkan performa perusahaan.

Laporan keuangan merupakan tujuan utama dari akuntansi yang memberikan informasi keuangan secara kuantitatif mengenai posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai maupun perusahaan itu sendiri.

Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi beragam pengguna laporan dalam membuat keputusan ekonomi.

Sejalan dengan itu, informasi akuntansi juga sangat dibutuhkan. Informasi tersebut disajikan di dalam laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan perusahaan memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan pada saat tertentu, prestasi operasi dalam suatu rentang waktu, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan perusahaan yang bersangkutan. Ditinjau dari sudut pandang manajemen, laporan keuangan merupakan media bagi mereka untuk mengkomunikasikan *performance* keuangan perusahaan yang dikelolanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan ditinjau dari sudut pandang pemakai, informasi akuntansi diharapkan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang rasional dalam praktek bisnis yang sehat.

Adapun peran akuntansi bagi perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Peran Akuntansi Sebagai Informasi Keuangan

Peran pertama dari akuntansi bagi perusahaan adalah sebagai sumber informasi keuangan perusahaan tersebut. Bagian di dalam akuntansi seperti pembukuan dan laporan keuangan menyediakan berbagai informasi mengenai berbagai macam transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Berbagai data yang berhubungan dengan keuangan akan di catat dalam buku besar secara terperinci dan rutin. Buku besar nantinya akan diteruskan dan menghasilkan laporan keuangan. Maka dari itu, sebaiknya dilakukan penyusunan pembukuan dengan rapi serta rutin dalam memperbaharui data.

b. Analisis Bisnis

Setelah dikumpulkan, data-data akuntansi tersebut diolah dan akan digunakan sebagai pisau analisis kinerja perusahaan. Data akuntansi mencerminkan kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan. Sehingga dapat membantu untuk memahami apa yang terjadi pada perusahaan serta membandingkan data saat ini dengan data sebelumnya. Jika terdapat variasi substansial dalam kinerja, pengusaha dapat menerapkan perubahan dalam perusahaan untuk mengoreksi perbedaan-perbedaan ini. Semakin sering data akuntansi disajikan, maka akan semakin mudah dalam peninjauan dan analisa laporan keuangan guna membuka peluang manajemen mengenali masalah kecil sebelum menjadi masalah besar.

c. Peran Akuntansi dalam Perencanaan Bisnis

Peran ini nantinya akan erat hubungannya dengan penganggaran perusahaan. Karena salah satu penggunaan paling umum dari informasi akuntansi adalah untuk membuat anggaran dan perkiraan untuk perencanaan bisnis. Dengan menggunakan data dari periode sebelumnya, perusahaan akan membuat anggaran dan rencana yang sebaiknya dilakukan untuk periode mendatang. Data ini dipakai mulai dari proyeksi penjualan dan keuntungan, evaluasi, pembuatan usulan anggaran, perencanaan bisnis berikutnya, negosiasi, hingga tinjauan dan persetujuan.

d. Penghubung dengan Pihak Ketiga

Selain berhubungan dengan urusan dalam perusahaan, akuntansi juga ada untuk membantu perusahaan terhubung dengan pihak luar. Para akuntan dan data-data akuntansi yang diolahnya berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan pihak ketiga untuk mengambil keputusan terkait kerja sama, proses jual beli, investasi

serta transaksi lainnya. Data akuntansi memberi informasi kepada pihak vendor ataupun investor untuk kemudahan pengambilan keputusan terkait perusahaan. Tentu hal ini sangatlah masuk akal sebab investor tidak akan melakukan investasi tanpa adanya informasi keuangan yang mutakhir dan juga akurat. Tidak sampai di situ, akuntansi dan elemen yang ada di dalamnya pun dapat menjadi penghubung antara perusahaan dengan pemerintah dalam hal pelaporan pajak dan proses audit.

- e. Peran Akuntansi sebagai Pengambilan Keputusan Investasi  
Jika poin sebelumnya lebih membahas mengenai pihak ketiga yang melakukan investasi ke dalam perusahaan, maka pada poin ini peran akuntansi berfungsi untuk memberi perusahaan pertimbangan ketika akan melakukan investasi ke luar. Perusahaan biasanya menggunakan data akuntansi untuk menentukan cara menginvestasikan dana. Dari hasil analisis keuangan perusahaan akan dilihat berapa banyak uang tunai yang dibutuhkan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Setelah hal ini selesai ditentukan, kemudian akan dipilih saham, obligasi atau investasi mana yang cocok untuk menyimpan uang tunai tersebut selama periode waktu yang dibutuhkan.

## **BAB IV**

# **USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)**

### **4.1. Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsip nya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha pada nilai asset awal (tidak termasuk tanag dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan ketiga alat ukur ini berbeda disetiap Negara.

Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah sering disingkat (UMKM). UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM telah diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional. UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.

Peranan UMKM yang sangat besar tersebut, memberikan penjabaran bahwa UMKM harus dapat ditingkatkan lebih baik lagi. UMKM akan mampu bertahan dan bersaing apabila mampu menerapkan pengelolaan manajemen secara baik. Pengelolaan manajemen secara umum mencakup



bidang pemasaran, produksi, sumber daya manusia (SDM), dan keuangan.

Menurut UU Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil didefinisikan sebagai:

- a. Usaha produktif milik warga negara Indonesia yang berbentuk badan usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum, termasuk koperasi.
- b. Anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau besar tidak termasuk dalam kategori usaha kecil.
- c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, definisi UMKM berubah menjadi:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil. Kriteria UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omzet

yang dimiliki masing-masing badan usaha sebagaimana rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sedangkan pengelompokan berdasarkan jumlah karyawan yang terlibat dalam sebuah usaha tidak dirumuskan dalam undang-undang tersebut merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil.

Kriteria UMKM dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah aset dan omzet yang dimiliki masing-masing badan usaha sebagaimana rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, sedangkan pengelompokan berdasarkan jumlah karyawan yang terlibat dalam sebuah usaha tidak dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Dalam dimensi lain, pemahaman mengenai UMKM yang dijelaskannya sebagai berikut :

1) Ukuran dari usaha atau jenis kewirausahaan/tahap pengembangan usaha. UMKM diklasifikasikan atas dasar (a) *self employment* perorangan, (b) *self employment* kelompok, dan (c) industri rumah tangga yang berdasarkan jumlah tenaga kerja dan modal usaha. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tahap perkembangan usaha UMKM dapat dilihat dari aspek pertumbuhan menurut pendekatan efisiensi dan produktivitas, yaitu (a) tingkat survival menurut ukurannya (*self employment* perorangan hingga industri rumah tangga); (b) tingkat konsolidasi menurut penggunaan teknologi tradisional yang diikuti dengan kemampuan mengadopsi teknologi modern; serta (c) tingkat akumulasi menurut penggunaan teknologi modern yang diikuti dengan keterkaitannya dengan struktur ekonomi maupun industri.

2) Tingkat penggunaan teknologi. Dalam hal ini, UMKM terdiri

atas UMKM yang menggunakan teknologi tradisional (yang nantinya akan meningkat menjadi teknologi modern) dan usaha UMKM yang menggunakan teknologi modern dengan kecenderungan semakin menguatnya keterkaitan

Pada Bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 (Undang-Undang Republik Indonesia No.20 2008) tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah adalah :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Definisi dan kriteria UMKM menurut lembaga-lembaga dunia dan negara-negara asing umumnya hampir sama dengan definisi dan kriteria yang dirumuskan di Indonesia. Definisi tersebut didasarkan pada berbagai aspek, seperti jumlah tenaga kerja, omzet, dan jumlah aset. Berikut adalah beberapa definisi yang dirumuskan oleh beberapa lembaga internasional

dan negara asing. World Bank membagi UMKM ke dalam 3 (tiga) kelompok dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Medium Enterprise dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 300 orang, pendapatan per tahun mencapai US\$15 juta, dan jumlah aset mencapai US\$15 juta.
- b. Small Enterprise dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari 30 orang, pendapatan per tahun tidak melebihi US\$3 juta, dan jumlah aset tidak melebihi US\$3 juta.
- c. Micro Enterprise dengan kriteria jumlah karyawan kurang dari 10 orang, pendapatan per tahun tidak melebihi US\$100 ribu, dan jumlah aset tidak melebihi US\$100 ribu.

Singapura mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang memiliki minimal 30% pemegang saham local serta fixed productive asset (aset produktif tetap) di bawah SG\$ 15 uta. Malaysia menetapkan definisi UMKM sebagai usaha yang memiliki jumlah karyawan tetap (full-time worker) kurang dari 75 orang atau usaha yang modal pemegang sahamnya kurang dari RM 2,5 juta.

#### **4.2. Ciri dan Karakteristik UMKM**

UMKM tidak hanya berbeda dari aspek modal, omzet, dan jumlah tenaga kerja. Perbedaan UMKM dengan usaha besar dapat pula dibedakan berdasarkan ciri dan karakteristik yang terdapat dalam UMKM itu sendiri. Menurut Saifuddin Sarief seperti dikutip oleh Ismet Abdullah (2004), ciri-ciri UMKM dapat dijelaskan berdasarkan kelompok usahanya. Usaha mikro, umumnya dicirikan oleh beberapa kondisi berikut:

- a. Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana, atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
- b. Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa

wirausaha yang memadai.

- c. Pada umumnya, tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak.
- d. Umumnya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- e. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 (empat) orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro. Perputaran usaha (*turnover*) umumnya cepat. Mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan, bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relatif rendah.
- f. Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan (asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat).

Rentang kuantitatif seperti dijelaskan dalam pasal 6 dalam “UU No 20 Tahun 2008”, bahwa kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Kecil: memiliki aset bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) antara Rp50.000.000 dan Rp500.000.000 atau memiliki penjualan tahunan antara Rp300.000.000 hingga Rp2.500.000.000;
- b. Usaha Menengah: memiliki aset bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) antara Rp500.000.000 dan Rp10.000.000.000 atau memiliki penjualan tahunan antara Rp2.500.000.000 dan Rp50.000.000.000.

Ciri-ciri usaha kecil di antaranya ditunjukkan oleh beberapa karakteristik berikut.

- a. Pada umumnya, sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan. Walaupun masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.

- b. SDM-nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha. Pada umumnya, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- c. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi belum dapat membuat business planning, studi kelayakan, dan proposal kredit kepada bank sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultan/pendamping.
- d. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki antara 5 sampai 19 orang.

Tatiek Koerniawati (2009) dalam beberapa kutipan merumuskan beberapa Ciri UMKM. Usaha mikro dicirikan oleh beberapa kriteria berikut:

- 1) Jenis barang atau komoditas usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan, yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- 4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- 5) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. Umumnya, belum memiliki akses ke perbankan, tetapi sebagian dari mereka sudah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank.
- 6) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.

Secara umum, ciri-ciri usaha menengah meliputi beberapa hal, yaitu:

- 1) Umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas, seperti bagian keuangan,

pemasaran, dan produksi.

- 2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank.
- 3) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, sudah menyediakan Jamsostek, pemeliharaan kesehatan, dan lain sebagainya.
- 4) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain.
- 5) Sudah memiliki akses terhadap sumber-sumber pendanaan perbankan.
- 6) Umumnya, telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Dengan berbagai ciri yang terdapat pada UMKM, sejatinya pihak yang berwenang perlu melakukan inventarisasi terhadap berbagai kelemahan yang dimiliki masing-masing UMKM sehingga pemetaan UMKM menjadi lebih akurat untuk menciptakan suatu program pemberdayaan UMKM yang sesuai dengan kondisi masing-masing UMKM. Dengan menggunakan kriteria kewirausahaan, UMKM dapat dibagi menjadi empat bagian (Tiktik, 2008), yaitu:

- a. *Livelihood Activities*: UMKM yang termasuk ke dalam kategori ini pada umumnya bertujuan mencari kesempatan kerja untuk mencari nafkah. Pelaku usaha di kelompok ini tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal. Di Indonesia, jumlah UMKM kategori ini adalah yang terbesar.
- b. *Micro Enterprises*: UMKM ini biasanya berupa artisan (pengrajin) dan tidak memiliki sifat kewirausahaan. Jumlah UMKM ini di Indonesia relatif besar.
- c. *Small Dynamic Enterprises*: Pelaku UMKM jenis ini biasanya

memiliki jiwa kewirausahaan. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini. Jika dibina dengan baik, sebagian UMKM kategori ini akan masuk ke kategori keempat. Jumlah kelompok UMKM ini jauh lebih kecil dari jumlah IJMKM pada kategori I dan 2. Kelompok UKM ini sudah dapat menerima pekerjaan sub-kontak dan ekspor.

- d. *Fast Moving Enterprises*: Pelaku UMKM jenis ini memiliki jiwa kewirausahaan yang sebenarnya. Dari kelompok ini, akan muncul usaha skala menengah dan besar. Memahami kriteria UMKM yang dikaitkan dengan konsep kewirausahaan akan memudahkan pihak yang berwenang untuk melakukan pembinaan UMKM. Tujuan dari pembinaan UMKM adalah memajukan mitra UMKM binaan. Untuk meringkas dan memberi pemahaman lebih mengenai apa itu UMKM.

Adapun kriteria UMKM secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini: **Kriteria UMKM**

No	Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
1.	Formalitas	Beroperasi di sektor informal; usaha tidak terdaftar; tidak/jarang bayar pajak	Beberapa beroperasi di sektor formal; beberapa tidak terdaftar; sedikit yang bayar pajak	Semua di sektor formal; terdaftar dan bayar pajak
2.	Organisasi dan Manajemen	Dijalankan oleh pemilik; tidak menerapkan pembagian kerja internal, manajemen dan struktur	Dijalankan oleh pemilik; tidak ada ILD, MOF, ACS	Banyak yang mengerjakan manajemen profesional; menerapkan ILD, MOF, ACS



No	Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
		organisasi formal; sistem pembukuan		
3.	Sifat dari kesempatan kerja	Kebanyakan menggunakan anggota-anggota keluarga, tidak dibayar	Beberapa menggunakan tenaga kerja yang digaji	Semua menggunakan tenaga kerja; semua memiliki sistem perekrutan formal
4.	Pola/sifat dari proses produksi	Derajat mekanisasi sangat rendah/umumnya manual; tingkat teknologi sangat rendah	Beberapa menggunakan mesin baru	Banyak yang menggunakan derajat mekanisasi yang tinggi
5.	Orientasi pasar	Umumnya menjual ke pasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah	Banyak yang menjual ke pasar domestik dan ekspor dan melayani kelas menengah ke atas	Semua menjual ke pasar domestik dan banyak yang di ekspor dan melayani kelas menengah ke atas
6.	Profil ekonomi dan social dari pemilik usaha	Pendidikan rendah dan dari rumah tangga miskin; motivasi utama survival	Banyak yang berpendidikan baik dan dari rumah tangga non-miskin; banyak yang bermotivasi bisnis/mencari profit	Sebagian besar berpendidikan baik dan dari rumah tangga makmur; motivasi utama profit
7.	Sumber-sumber	Kebanyakan menggunakan	Beberapa menggunakan	Banyak yang menggunakan

No	Kriteria	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
	dari bahan baku dan modal	bahan baku lokal dan uang sendiri	bahan baku impor dan mempunyai akses ke kredit formal	bahan baku impor dan mempunyai akses ke kredit formal
8.	Hubungan- hubungan eksternal	Kebanyakan tidak mempunyai akses ke program-program pemerintah dan tidak mempunyai hubungan-hubungan bisnis dengan usaha besar	Banyak yang mempunyai akses ke program-program pemerintah dan mempunyai hubungan-hubungan bisnis dengan usaha besar	Sebagian besar mempunyai akses ke program-program pemerintah dan mempunyai hubungan-hubungan bisnis dengan usaha besar

### 4.3. Kendala yang Dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Dari berbagai kajian dan upaya-upaya pembinaan usaha ekonomi rakyat di Indonesia, permasalahan yang seringkali dihadapi antara lain meliputi: akses pasar, pembiayaan usaha, rendahnya kemampuan teknik produksi dan kontrol kualitas, manajemen secara umum. Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kendala internal dan eksternal.

#### a. Faktor Internal

- 1) Terbatasnya jumlah modal merupakan kendala utama dalam pengembangan usaha Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) dalam menjalankan usahanya. Kurangnya permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.

- 2) Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.
- 3) Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

#### b. Faktor Eksternal

##### 1) Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif

Kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuhkembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.

- 2) Terbatasnya Sarana dan Prasarana  
Usaha kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan.
- 3) Implikasi Otonomi Daerah Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Disamping itu semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.
- 4) Implikasi Perdagangan Bebas  
Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dituntut untuk

melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14.000) dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (*Non Tariff Barrier for Trade*). Untuk itu maka diharapkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu mempersiapkan agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

5) Sifat Produk dengan *Lifetime* Pendek

Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fasion dan kerajinan dengan *lifetime* yang pendek.

6) Terbatasnya Akses Pasar

Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional

Dari sekian banyak permasalahan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terjadi di Indonesia, beberapa permasalahan di bawah ini yang paling sering terjadi, yaitu :

a. Minimnya Modal.

Permasalahan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) paling utama adalah modal usaha yang terbatas. Akibatnya, para pengusaha tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omzet lebih banyak. Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mungkin saja memiliki banyak ide bisnis untuk mengembangkan usahanya, namun harus terhenti karena tidak adanya modal tambahan. Jika ditelusuri ke belakang, banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang kesulitan untuk mendapatkan modal tambahan.

b. Distribusi Tidak Tepat

Kurangnya *channel* untuk pendistribusian barang juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Rekomendasi teman dan pemasaran dari mulut ke mulut bahkan menjadi *channel* favorit pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam memasarkan produknya. Kenyataan di lapangan, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang didominasi oleh generasi X hanya berfokus pada kualitas produksi barang. Sehingga, terkadang distribusi menjadi kurang fokus dan ditempatkan pada nomor ke sekian. Padahal, salah satu permasalahan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sering dihadapi oleh usaha kecil adalah distribusi dan pemasaran yang kurang tepat. Jika tahu tentang teknik pemasaran yang tepat, peluang usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berkembang semakin besar.

c. Pengelolaan Keuangan Tidak Efisien

Memiliki arus kas yang kuat dapat membuat bisnis berjalan. Karena, pada dasarnya manajemen keuangan berhubungan langsung dengan arus kas. Pengelolaan arus kas yang salah akan menimbulkan masalah pada bisnis. Itulah permasalahan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sering dihadapi saat ini. Tidak sedikit pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia yang tidak memperhatikan pengelolaan keuangan bisnis. Hal tersebut tentunya berakibat pada pengelolaan keuangan tidak bekerja secara efisien. Pengelolaan keuangan yang tidak efisien akan membuat masalah. Salah satunya masalah yang dihadapi perihal keuangan yaitu adanya pengeluaran keuangan lebih besar dari pemasukan. Hal itu berarti bisnis tidak menghasilkan pendapatan yang cukup dari pelanggan.

d. Kurangnya Inovasi

Banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) jalan di tempat dalam mengembangkan usahanya karena minimnya inovasi. Akhirnya banyak usaha yang hanya bertahan selama 1-2 tahun, kemudian bangkrut karena produk atau jasa yang ditawarkan tidak kuat atau kalah bersaing. Banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia yang hanya menjalankan bisnis berdasarkan ikut-ikutan tanpa melihat potensi diri yang dimilikinya. Tidak mengherankan jika produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal yang berhasil menembus pasar internasional terbilang masih sedikit. Pelaku UMKM diharapkan mampu untuk berpikir kritis sekaligus inovatif dalam memproduksi barang dan jasa. Meski barang yang ditawarkan sejenis, tetapi jika masing-masing memiliki perbedaan yang signifikan membuat konsumen mempunyai banyak pilihan

e. Belum Memaksimalkan Pemasaran *Online*

Salah satu faktor yang menyebabkan pendistribusian barang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kurang meluas karena pengusaha belum melakukan pemasaran *online*. Mungkin, beberapa pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sudah memasarkan produknya secara *online* melalui media sosial, situs *marketplace*, dan lainnya. Akan tetapi, dalam praktiknya masih kurang maksimal. Sehingga, hasil yang didapat pun kurang maksimal. Kurangnya pengetahuan sampai dengan adaptasi terhadap internet dan perkembangan teknologi yang dialami pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini menjadi tantangan dan masalah yang harus dihadapi.

f. Pembukuan Masih Manual

Pembukuan termasuk dalam pengelolaan keuangan yang menjadi salah satu inti keberhasilan usaha. Kesulitan dalam memperhitungkan omset, laba kotor sampai dengan laba

bersih karena pembukuan yang masih manual seringkali menghambat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk bisa *growth* dan *scale up* bisnisnya. Walaupun terkesan tata tertib, pembukuan untuk bisnis merupakan hal yang sepele, nyatanya dengan data pembukuanlah suatu perusahaan bisa mengukur keberhasilan dan merencanakan strategi perusahaan ke depannya

g. Manajemen Waktu

Manajemen waktu merupakan hal yang terlihat sepele. Namun pada dasarnya manajemen waktu merupakan permasalahan yang banyak dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Lebih dari 90% pemilik bisnis bekerja *multitasker*. Mereka bekerja menjadi pengusaha sekaligus pemilik bisnis kecil dan pengurus semua masalah bisnis kecil. Jika tidak berusaha mengatur waktu sebaik mungkin, para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan mengalami kesulitan terkait dengan itu. Maka, perlu dibuat sebuah daftar hal yang akan dilakukan "*to do list*". Hal tersebut akan memudahkan para pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bekerja *multitasker* dalam mengatur waktu. Satu hal lagi, orang yang mengatur waktu dengan baik adalah orang yang membuat perbedaan.

h. Tidak Memiliki Izin

Permasalahan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terakhir yaitu tidak adanya izin usaha resmi, sehingga menghambat laju usaha. Jika ingin mengembangkan usaha dan menjadi lebih besar lagi, maka sudah waktunya mengurus izin resmi untuk usaha. Kepemilikan badan hukum yang jelas hanya dimiliki oleh segelintir pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Mayoritas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga mengalami tantangan di bidang pengetahuan mengenai aspek legalitas dan



perizinan, termasuk persyaratan sampai dengan bagaimana proses yang ditempuh dalam proses pengurusannya.

Demikianlah ulasan mengenai beberapa permasalahan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sering terjadi. Sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sebaiknya tidak melihat permasalahan tersebut sebagai penghalang untuk berkembang, melainkan sebagai tantangan untuk bisa maju dan berkembang menjadi lebih baik.

Solusi dari berbagai persoalan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah dengan membentuk wadah kerja sama di dalam profesi yang sama, yaitu koperasi (khususnya bagi usaha mikro dan kecil). Dengan dibentuknya koperasi, diharapkan terjadi kerja sama antar pengusaha mikro dan kecil dalam berbagai aspek yang dibutuhkan, misalnya membeli bahan baku secara bersama-sama sehingga kuantitas yang dibeli dapat lebih besar dan mendapatkan harga yang lebih murah. Di samping itu, dapat pula dilakukan kerja sama antar koperasi dengan berbagai usaha besar dan BUMN guna memfasilitasi usaha mikro dan kecil melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).

Hal yang tidak kalah penting adalah jika usaha mikro dan kecil dapat dipersatukan dalam koperasi maka koperasi dapat memberikan pelatihan bagi pengusaha mikro dan kecil sehingga berbagai hambatan yang selama ini dialami dapat diantisipasi. Di samping itu, program yang ditawarkan pemerintah merupakan alternatif yang sangat baik untuk mengatasi berbagai persoalan yang tengah dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Selain itu yang perlu menjadi perhatian juga mengenai aspek hukum atau legalitas usaha. Aspek hukum yang paling mendasar bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah legalitas badan usaha. Sebagian besar Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) di Indonesia, khususnya usaha kecil dan mikro, tidak berbadan hukum. Dengan kondisi demikian berbagai hal yang berhubungan dengan pihak ketiga akan sulit untuk dilaksanakan. Misalnya hubungan ke bank untuk memperoleh pinjaman modal dan hak paten terhadap merek produk kemasan, dan sebagainya. Sejatinya, pengembangan usaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus didukung dengan penguatan kelembagaan. Jika ini tidak dilakukan maka akan sulit bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk melakukan perluasan usaha, baik pada aspek modal pasar, dan sebagainya.

#### **4.4. Peran Akuntansi bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Secara umum akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang memberikan keterangan-keterangan mengenai data ekonomi untuk mengambil keputusan bagi siapa saja yang memerlukannya. Akuntansi adalah suatu pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumberdaya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi juga berperan penting dalam kemajuan suatu usaha kecil. Tetapi, selama ini masih banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang belum memahami arti penting akuntansi yang terimplementasi dalam laporan keuangan, padahal hal tersebut sangat besar manfaatnya bagi perkembangan usaha.

Peran akuntansi melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKIAI) tahun 2016 telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) sebagai bentuk

dukungan IAI dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Standar tersebut disusun untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan sebagaimana informasi akuntansi yang dapat diterima secara umum, namun di Indonesia masih banyak pelaku usaha mikro yang tidak menyelenggarakan dan menggunakan informasi akuntansi dalam mengelola usahanya. Pelaku usaha mikro biasanya hanya melakukan pencatatan yang berkaitan dengan penjualan saja. Akibatnya, pelaku usaha mikro tidak mengetahui posisi keuangan usahanya dan besarnya laba bersih yang di dapatkan.

Akuntansi menurut Komite Terminologi dari American Institute of Certified Public Accountant didefinisikan sebagai suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang mengenai transaksi-transaksi yang sebagian besar memiliki sifat keuangan yang kemudian diinterpretasikan hasilnya. Menurut Kieso dkk (2016), akuntansi adalah sebuah proses yang terdiri atas tiga aktivitas, yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengomunikasian. Dalam proses identifikasi ini, terjadi proses pengumpulan dan pemilahan bukti-bukti dari aktivitas ekonomi yang relevan.

Banyak sekali pihak yang membutuhkan informasi keuangan untuk digunakan dalam mengambil keputusan yang bersifat ekonomis. Makin majunya peradaban dan kegiatan ekonomi, makin penting pula informasi tersebut. Informasi keuangan salah satunya dihasilkan melalui akuntansi. Pada era informasi, peran akuntansi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan keuangan dalam suatu usaha makin dibutuhkan. Akuntansi sebagai suatu sistem pengukuran dan pencatatan dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi (kekayaan) yang akan menghasilkan

informasi keuangan. Informasi keuangan perusahaan tersebut ditujukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*) guna membantu mereka dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, akuntansi sering disebut sebagai bahasa perusahaan (*business language*) atau bahasa pengambilan keputusan (*financial decision of language*).

Peran akuntansi adalah memberikan informasi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan bisnis. Menurut Pinasti (2017: 322) informasi akuntansi dapat menjadi dasar yang andal bagi pengambilan keputusan-keputusan dalam pengelolaan usaha kecil, antara lain keputusan pengembangan pasar, penetapan harga, dan lain-lain. Pengambilan keputusan yang tepat dapat menentukan keberhasilan dari sebuah usaha. Oleh karena itu, informasi akuntansi memiliki peran yang penting bagi pelaku bisnis dalam mencapai keberhasilan usahanya, termasuk bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Mengingat bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menghadapi berbagai permasalahan seperti lemahnya jaringan usaha, keterbatasan kemampuan penetrasi pasar dan diversifikasi pasar, skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya, margin keuntungan sangat kecil, dan lebih jauh lagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak memiliki keunggulan kompetitif.

Akuntansi dapat pula memberikan laporan aktivitas keuangan yang sedang berjalan, akan memberikan dasar informasi dalam pengambilan keputusan yang strategis mengenai perkembangan unit usaha. Penerapan akuntansi dasar pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menghasilkan laporan keuangan sebagai output akan memperlancar kegiatan usaha, bahan evaluasi kinerja, memperlakukan perencanaan yang efektif sehingga dapat meyakinkan pihak eksternal dalam keikutsertaan penanaman

modal pada unit usaha maupun peminjaman dana oleh kreditor.

# **BAB V**

## **PEMBAHASAN PENELITIAN**

### **5.1. Pendahuluan**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang berskala kecil, yang dapat dikelola oleh sekumpulan keluarga maupun kelompok perorangan yang bertujuan mendirikan suatu usaha. UMKM bukan merupakan anak dari suatu perusahaan maupun cabang dari suatu perusahaan, baik menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari perusahaan sesuai kriteria yang telah ditentukan (UU Nomor 20 tahun 2008).

Tingkat pertumbuhan UMKM saat ini mendapat perhatian oleh pemerintah dengan memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku usaha baik dari sektor permodalan maupun perpajakan. UMKM diketahui sangat memberikan kontribusi yang besar dan krusial bagi perekonomian secara makro. Pada tahun 2020 jumlah UMKM yang tersebar diseluruh Indonesia sebanyak 26.422.256, Badan Pusat Statistik (2016). Dari angka tersebut terdapat potensi yang sangat besar apabila usaha tersebut dikembangkan dan ditingkatkan sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia. Sesuai dengan pernyataan, Martauli (2019), keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian negara.

Persebaran UMKM dapat dijumpai di setiap daerah dan jumlahnya semakin banyak tiap tahunnya. Peningkatan jumlah kuantitas UMKM diharapkan sejalan dengan perkembangannya yang semakin meningkat sehingga mampu berkontribusi terhadap permasalahan ekonomi dan sosial negara. Agar sektor UMKM dapat bertahan untuk jangka panjang maka diperlukan

perhatian pemerintah agar UMKM tetap dapat maju dan berkembang. Apalagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimulai pada tahun 2015, maka UMKM diharapkan untuk dapat semakin produktif dan berdaya saing. Namun UMKM Indonesia harus mewaspadai persaingan yang semakin tajam. Karena UMKM di Indonesia memiliki peran strategis.

Selain itu juga, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sehingga memperkecil angka pengangguran, membentuk produk domestik bruto dan mampu menjadi jaring pengaman untuk masyarakat yang berpendapatan rendah. Namun permasalahan yang timbul di lapangan adalah masih banyaknya pelaku usaha yang menemukan kesulitan dalam pemberian kredit oleh perbankan disebabkan oleh kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Menurut Mulyani (2014), bahwa UMKM secara umum merupakan usaha industri keluarga yang mana konsumen adalah dikalangan menengah kebawah. Akan tetapi, UMKM cenderung mampu lebih bertahan jika diperbandingkan dengan perusahaan skala besar.

Dalam menghadapi tantangan, UMKM masih rendah dan memiliki kelemahan. Menurut Benjamin (1990), bahwa kelemahan UMKM yaitu masih rendahnya pendidikan dan pengetahuan sehingga dapat menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Laporan keuangan merupakan output proses akuntansi dalam menyediakan informasi keuangan dalam suatu usaha yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan, Ningtiyas (2017). Selain kendala utama yang dihadapi oleh UMKM yaitu permodalan yang masih kurang. Namun masih banyak UMKM yang belum dapat mengakses kebijakan pemerintah dalam permodalan. Diakibatkan UMKM masih cenderung sepele dalam membuat laporan keuangan yang dianggap tidak penting.

Semakin berkembangnya suatu usaha, menuntut UMKM untuk berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan. Misalnya untuk meningkatkan pendanaan. UMKM akan berhubungan dengan pihak bank/ lembaga keuangan lainnya yang bertindak sebagai kreditor/ penyedia modal. Pihak bank/ lembaga keuangan tersebut biasanya akan meminta laporan keuangan untuk menilai kelayakan kredit dari UMKM. Hal inilah yang nantinya menjadi tuntutan bagi UMKM untuk menyediakan laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai dengan standar (SAK ETAP) agar tidak terjadi asimetri informasi diantara kedua pihak tersebut. Selain itu, laporan keuangan juga memberikan banyak manfaat pada suatu entitas. Manfaat-manfaat tersebut antara lain untuk mengetahui apakah usaha yang dilakukan memberikan keuntungan atau kerugian, dan dapat mengetahui perkembangan usaha,

Salah satu tolak ukur kinerja pelaku usaha tersebut dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan dalam bentuk pencatatan atau pembukuan yang ada dalam usaha tersebut. Kelemahan ini dibuktikan dari hasil penelitian BI Cabang Medan bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) pada Oktober 2008 diketahui hanya 22,5% pelaku UKM yang memiliki laporan keuangan dan 87,8% pelaku UKM yang menyusun laporan keuangan secara tidak layak. Di era industri 4.0 pelaku usaha UMKM harus mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan karena besar kemungkinan dapat membantu mereka dalam hal pemberian pinjaman modal oleh perbankan atau non perbankan lainnya.

Dalam penelitian ini dilakukan analisis kualitas laporan keuangan terhadap kinerja usaha UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja usaha UMKM.



## 5.2. Kerangka Pemikiran

Penelitian tentang kualitas laporan keuangan dan UMKM serta standar yang mendasari pelaporan keuangannya telah banyak dilakukan, penelitian ini mencoba menyajikan mengenai standar baru yang diwajibkan bagi UMKM sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh IAI yakni SAK EMKM yang telah diperkenalkan akhir tahun 2016 lalu. Beberapa penelitian tentang standar laporan keuangan untuk UMKM dengan standar sebelumnya yakni SAK ETAP berkaitan dengan kualitas laporan keuangan UMKM tentang pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi tumbuh dan berkembangnya usaha seperti jenjang pendidikan terakhir, latar belakang pendidikan, ukuran usaha, serta lama usaha berdiri, telah dilakukan oleh beberapa peneliti.

Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh Sukirno, (1994) menyimpulkan bahwa lamanya suatu usaha dapat menimbulkan pengalaman berusaha, dimana pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam bertindak laku, lama usaha UMKM biasanya mungkin sudah berpengalaman dengan pinjaman kredit untuk permodalannya.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Pinasti (2001) menyatakan bahwa lama usaha terutama UMKM yang sudah berjalan cukup lama memungkinkan pengusaha tersebut lebih mementingkan laporan keuangan atau justru mengabaikannya. Lama suatu usaha berdiri diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap persepsi pengusaha UMKM yang terbentuk. Pinasti (2001) juga menyatakan bahwa ukuran usaha dapat mempengaruhi pemikiran pengusaha terkait dengan kompleksitas dan semakin tingginya tingkat transaksi perusahaan sehingga diharapkan dengan makin besarnya ukuran usaha maka dapat mendorong seseorang untuk berpikir dan belajar terkait solusi untuk menghadapinya. Latar

belakang pendidikan pengusaha berasal dari bidang akuntansi biasanya mempunyai persepsi pentingnya pembuatan laporan keuangan, berbeda dengan yang latar belakang pendidikannya dari bidang non akuntansi. Latar belakang pengusaha UMKM baik yang berasal dari bidang akuntansi maupun ekonomi atau bidang lainnya dapat mempengaruhi persepsinya terkait pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi tumbuh berkembangnya usaha.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Murniati (2002) menyatakan bahwa jenjang pendidikan terakhir pengusaha seperti lulusan pendidikan SMA, SMK, S1 biasanya mempengaruhi pemahaman tentang pelaporan keuangan yang berstandar akuntansi. Oleh karena itu, jenjang pendidikan formal yang rendah cenderung tidak memiliki persiapan dan penggunaan informasi akuntansi yang memadai dibandingkan pengusaha yang memiliki pendidikan formal yang lebih tinggi.

Klasifikasi perusahaan atau yang sering disebut dengan ukuran perusahaan merupakan karakteristik yang dapat mengklasifikasikan apakah suatu perusahaan termasuk ke dalam ukuran kecil, menengah, ataupun besar. Short dan Kessey dalam Manan (2004) menyatakan bahwa besarnya ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kemudahan suatu perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.

Syarat lainnya dalam penyaluran kredit adalah kecukupan informasi terutama informasi keuangan merupakan penyebab rendahnya tingkat penyaluran kredit UMKM, sehingga pihak perbankan (pemberi pinjaman) tidak memiliki cukup informasi dalam melakukan penilaian kelayakan kredit (Cziraky, Tisma, dan Pisarovic 2005). Pentingnya informasi keuangan bagi kreditor merupakan syarat dalam pemebrian kredit juga dikatakan oleh (Baas dan schrooten 2006) bahwa salah satu teknik pemberian kredit yang paling banyak

digunakan adalah *financial statement lending* yang mendasarkan pemberian kreditnya atas informasi keuangan dari debiturnya.

Dalam aktivitas perbankan dikatakan bahwa untuk mendapatkan pinjaman dari bank, maka nasabah harus mengajukan permohonan kredit. Setiap permohonan kredit tersebut dapat diajukan secara tertulis kepada pihak bank, tanpa melihat berapa jumlah kredit yang diminta.

Penelitian dari Riskayanto, Sulistiowati (2006) menyatakan bahwa pengajuan kredit berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diterima UMKM. Penelitian lainnya dilakukan oleh Aufar (2013) menyatakan bahwa pendidikan terakhir pemilik UMKM berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi.

Semakin tumbuh dan besarnya usaha UMKM, persepsi pengusaha semakin memandang penting atau tidaknya kebutuhan untuk melakukan pelaporan keuangan.

Presepsi menjadi titik awal seseorang dalam menilai dan menjalankan suatu hal, termasuk pembukuan dan pelaporan keuangan (Schiffman dan Kanuk, 2010). Lama usaha merupakan lamanya pedagang berkarya pada usaha perdagangan yang sedang di jalani saat ini (Asmie, 2008).

Penelitian dari Nofianti (2011) menyatakan bahwa variabel ukuran usaha berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diterima. Penelitian yang sama dilakukan oleh Pratiwi, Sondhak, dan Kalangi (2014) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap jumlah kredit yang diterima UMKM.

Standar atau acuan dalam penusunan laporan keuangan harus diketahui atau di informasikan terlebih dahulu kepada pengguna, seperti SAK ETAP, begitu juga dengan SAM EMKM ini, dengan adanya informasi dan sosialisasi terkait Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP

), maka pengusaha akan mendapat pemahaman yang jelas tentang standar tersebut. Terkait dengan informasi ini, Rudiantoro, Siregar (2011) menyatakan bahwa informasi dan sosialisasi SAK ETAP berpengaruh terhadap pemahaman pengusaha pada SAK ETAP. Dalam hal ini latar belakang pendidikan pengusaha yang bukan dari bidang akuntansi akan mengalami kesulitan saat memahami Standar Akuntansi untuk Entitas terhadap Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

Penelitian dari Rudiantoro, Siregar (2011) menyatakan bahwa pendidikan terakhir berpengaruh terhadap pemahaman pengusaha pada SAK ETAP. Semakin besar jumlah aset yang dimiliki suatu perusahaan maka akan semakin besar pula modal yang tertanam dalam perusahaan tersebut, semakin banyak penjualan yang dapat dihasilkan oleh suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar. Ukuran perusahaan merupakan karakteristik yang dapat mengklasifikasikan apakah suatu perusahaan termasuk ke dalam ukuran kecil, menengah, ataupun besar. Ukuran usaha kecil, menengah, besar apakah memahami tentang SAK ETAP. Sehingga dapat dikatakan bahwa ukuran usaha berpengaruh terhadap pemahaman pengusaha pada SAK ETAP.

Penelitian lainnya mengenai SAK ETAP dan UKM dilakukan oleh Gusnardi dkk (2015) mengatakan bahwa prospek implementasi SAK-ETAP di Kota Pekanbaru masih sangat rendah, hanya 13% responden yang tahu akan informasi SAK-ETAP dan tidak ada satu pun responden yang mengaku paham akan isi SAK ETAP tersebut, hal ini dianggap wajar karena SAK-ETAP masih baru dan sangat kurang disosialisasikan oleh pihak terkait, sehingga mengakibatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan masih sangat jauh dari standar akuntansi keuangan yang berlaku sehingga laporan keuangan yang disajikan hanya sebatas pembukuan

biasa untuk mengetahui alur perputaran kas dan besarnya rugi atau laba yang diperoleh dalam waktu tertentu.

### **5.3. Metode**

#### **5.3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini terletak di Medan Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi di daerah ini karena banyaknya bermunculan pengusaha-pengusaha UMKM dari Sumatera Utara dan tingkat perkembangan perekonomiannya maju pesat. Selain itu juga ingin mengetahui bagaimana perkembangan UMKM yang ada di Medan Provinsi Sumatera Utara terkait dengan kualitas laporan keuangannya. Penelitian ini dilakukan pada bulan November sampai dengan Desember 2022.

#### **5.3.2. Cara Cara Menentukan Ukuran Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Medan Provinsi Sumatera Utara. Teknik pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan cluster saat pengumpulan data dilakukan. Alasan pemilihan teknik pengambilan sampel ini adalah untuk mempermudah proses pengambilan sampel. Sedangkan ukuran sampelnya ditetapkan berdasarkan rumus Taro Yamane.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Dikelola oleh pemiliknya sendiri.
- b. Memiliki sedikitnya 2 atau lebih karyawan (termasuk pemilik).
- c. Memiliki umur usaha sedikitnya 2 tahun.
- d. Baik pemilik maupun karyawan bersedia diwawancarai.

Subyek dalam penelitian ini meliputi pengelola, dan pemilik UMKM di Medan Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 100 responden pemilik UMKM.

### **5.3.3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan atau menggambarkan tentang sifat-sifat (karakteristik) dari suatu keadaan atau objek penelitian yang sudah disebutkan. Hasilnya kemudian dipaparkan dalam bentuk penelitian (Sugiyono, 2012:14). Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan. Sumber data di sini adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang Amir Hasan dan Gusnardi digunakan meliputi: a) data primer, dikumpulkan secara langsung kepada responden dengan menggunakan alat bantu kuesioner. Pengumpulan data primer digunakan dengan alat bantu kuesioner/angket, dan b) data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini dilakukan di di Medan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan unit observasi UMKM, penggunaan unit UMKM dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh UMKM dan standar keuangan yang dipakai dalam pembuatan laporan keuangannya. Adapun jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 100 pelaku usaha UMKM. Metode penentuan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*.

### 5.3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di bagi dalam tiga tahapan yakni, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam observasi melibatkan dua komponen yaitu si pelaku observasi yang lebih dikenal sebagai observer, dan objek yang diobservasi dikenal sebagai *observe*. Dalam konteks penelitian ini observasi dilakukan untuk mengamati perkembangan UMKM.

Teknik wawancara dilakukan dengan membuat pedoman wawancara yang sesuai dengan permasalahan yang akan digunakan untuk tanya jawab dengan responden. Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang sebelumnya telah diperoleh melal ui proses observasi. Dokumentasi pada penelitian ini lebih pada pengumpulan dokumentasi pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan. Pada penelitian ini, dokumentasi berguna sebagai penggunaan teknik pengumpulan data dengan observasi maupun wawancara.

### 5.3.5. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data dari hasil penyebaran kuesioner, data yang didapat masih dalam bentuk skala ordinal. Penulis harus merubah data tersebut dari skala ordinal menjadi skala interval dengan menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI). Hal tersebut karena penulis menggunakan metode analisis linier berganda dalam pengolahan datanya.

Menurut Syarifudin (2011:55) *Method of Successive Interval* adalah metode penskalaan untuk menaikkan skala pengukuran ordinal ke skala pengukuran interval. Sebelum data dianalisis dengan menggunakan metode analisis linier berganda untuk data yang berskala ordinal harus dirubah

menjadi data dalam bentuk skala interval karena penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang di dapat dari skala ordinal masih berupa kalimat sehingga harus dirubah menjadi angka-angka yaitu skala interval. Perubahan data dari skala ordinal menjadi skala interval dengan menggunakan teknik *Method of Successive Interval* (MSI). Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : (Al Rasyid, 2014: 131)

- a. Menentukan frekuensi tiap responden (berdasarkan kuesioner yang dibagikan, hitung berapa banyak responden yang menjawab skor 1-5 untuk setiap pertanyaan).
- b. Menentukan berapa responden yang akan memperoleh skor-skor yang telah ditentukan dan dinyatakan sebagai frekuensi.
- c. Setiap frekuensi pada responden dibagi dengan keseluruhan responden, disebut dengan proporsi.
- d. Menentukan proporsi kumulatif yang selanjutnya mendekati atribut normal.
- e. Dengan menggunakan tabel distribusi normal standar kita tetukan nilai Z.
- f. Menentukan nilai Skala (*scale value/SV*).

$$SV = \frac{\text{Density at lower limit} - \text{Density at upper limit}}{\text{Area under upper limit} - \text{Area under lower limit}}$$

- g. Menghitung skor hasil transformasi untuk setiap pilihan jawaban dengan menggunakan rumus :

$$y = sv + [k]$$

$$k = 1[SV_{\min}]$$

Pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan media komputerisasi, yaitu menggunakan SPSS for windows untuk memudahkan proses perubahan data dari skala ordinal ke skala interval.



### 5.3.5.1. Regresi Linier

Regresi linier bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \epsilon$$

Y = Kualitas Laporan

$\alpha$  = Keuangan

$\beta$  = Konstanta

X = Koefisien Regresi

1 = Kinerja UMKM

$\epsilon$  = Kesalahan Residual

Sebelum dilakukan regresi linier maka uji asumsi klasik terlebih dahulu harus dilakukan. Uji asumsi klasik merupakan pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear yang berbasis *ordinary least square* (OLS).

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Imam, 2013: 105). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji *Kolmogorov Smirnov* satu arah atau analisis garis. Dalam penelitian ini, uji normalitas data yang digunakan adalah dengan metode grafik yang ditunjukkan dengan residual terdistribusi secara normal dan berbentuk simetris tidak menceng ke kanan atau ke kiri, titik-titik akan menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal. Rumus yang digunakan adalah rumus *Kolmogorov Smirnov* (K-Z) sebagai berikut :

$$KS = \frac{X_i - \bar{X}}{SD}$$

(Sugiyono, 2019: 230)

Keterangan :

$X_i$  = Angka pada data

$Z$  = Transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal

$F_r$  = Probabilitas kumulatif normal; kumulatif proporsi luasan kurva normal berdasarkan notasi  $Z_i$  di hitung dari luasan kurva mulai dari ujung kiri kurva sampai dengan titik  $Z$

$F_s$  = Probabilitas kumulatif empiris (1/data ke n)

## b. Uji Linieritas

Uji linieritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengaruh masing-masing variabel bebas yang dijadikan prediktor mempunyai hubungan linier atau tidak terhadap variabel terikat. Rumus yang dapat digunakan untuk uji linieritas adalah sebagai berikut :

$$F_{reg} = \frac{RK_{reg}}{RK_{res}}$$

(Sugiyono, 2019: 232)

Keterangan :

$F_{reg}$  = harga bilangan F untuk garis regresi

$RK_{reg}$  = rerata kuadrat garis regresi

$RK_{res}$  = rerata kuadrat residu

Signifikansi ditetapkan 5% sehingga apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka dianggap pengaruh antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat adalah linier dan sebaliknya jika  $F_{hitung} \geq F_{tabel}$  maka tidak linier.

### c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal (Ghozali, 2013: 91). Untuk itu diperlukan uji multikolinieritas terhadap setiap data variabel bebas yaitu:

- 1). Melihat angka *collinearity statistics* yang ditunjukkan oleh nilai nilai *variance inflation factor* (VIF). Jika angka VIF < 10, maka variabel bebas yang ada memiliki masalah multikolinieritas.
- 2). Melihat nilai *tolerance* pada *output* penilaian multikolinieritas yang tidak menunjukkan nilai > 0,1 yang akan memberikan kenyataan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas.

### d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* antara SRESID dan ZPRED. Dasar analisisnya adalah sebagai berikut:

- 1). Jika titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas.

- 2). Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

### 5.3.5.2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji simultan dan uji parsial.

#### a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah :

- 1) Jika  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ , artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.
- 2) Jika  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ , artinya ada pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

Adapun rumus untuk menghitung uji t adalah sebagai berikut :

$$t = \frac{r_{xy} \pm \sqrt{n-2}}{\sqrt{(1-r_{xy})^2}}$$

(Sugiyono, 2012: 250)

Keterangan :

t = t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel

rt = Korelasi parsial yang ditentukan

n = Jumlah sampel

### b. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat) secara simultan. Kriteria pengujian yang digunakan adalah :

- 1) Apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.
- 2) Apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak artinya ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

Uji F dapat dilakukan hanya dengan melihat nilai signifikansi F yang terdapat pada output hasil analisis regresi yang menggunakan SPSS versi 19.0. Jika angka signifikansi F lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05) maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Adapun rumus untuk menghitung uji F adalah sebagai berikut :

$$f_h = \frac{R^2/K}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

(Sugiyono, 2012: 257)

Keterangan :

$F_h$  = Tingkat Signifikan

$R^2$  = Koefisien korelasi berganda yang telah ditemukan

$k$  = Jumlah variabel independen

$n$  = Jumlah anggota sampel

### 5.3.5.2.3. Pengujian Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )

Pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar antara nol sampai satu. Nilai  $R^2$  yang semakin kecil mendekati nol menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, bila  $R^2$  semakin besar mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Uji Koefisien Determinasi dirumuskan sebagai berikut :

$$D = R^2 \times 100$$

(Sugiyono, 2012: 264)

Keterangan :

D = Koefisien determinasi

R = Koefisien Korelasi Berganda

## **5.4. Hasil dan Pembahasan**

### **5.4.1. Uji Validitas**

Uji validitas merupakan uji yang didasarkan pada penelitian ini, dengan menggunakan kriteria untuk menyatakan bahwa instrumen yang digunakan dianggap valid atau layak untuk dapat digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis. Tabel 1, menunjukkan bahwa pengujian validitas data dengan menggunakan *Pearson Correlation*. Jika dilihat hasil uji validitas pada tabel 1, dapat diketahui dari 8 item yang digunakan bahwa seluruhnya memiliki nilai pearson correlation lebih dari 0,05 (taraf 5%). Artinya variabel yang digunakan valid untuk tahap selanjutnya.

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas**

Item pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
KLP1	0,653	0,1966	Valid
KLP2	0,604	0,1966	Valid
KLP3	0,558	0,1966	Valid
KLP4	0,654	0,1966	Valid
KLP5	0,715	0,1966	Valid
KLP6	0,638	0,1966	Valid
KLP7	0,636	0,1966	Valid
KLP8	0,684	0,1966	Valid

#### 5.4.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas pada penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha* yang terdapat pada aplikasi SPSS. Reliabel konstruk yang digunakan jika dapat memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Hasil uji reliabilitas pengaruh kualitas keuangan dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Data**

Variabel	Cronbach Alpha	Koefisien Cronbach Alpha	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan	0,6	0,792	Reliabel
Kinerja	0,6	0,799	Reliabel

Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas nilai kualitas laporan keuangan dan kinerja memiliki nilai >0,60, masing masing yaitu untuk laporan keuangan sebesar 0,792

dan kinerja 0,799, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrument kuesioner pada penelitian ini layak (*reliable*) untuk dipergunakan.

### 5.4.3. Statistik Deskriptif

Objek dalam penelitian ini adalah UMKM Kota Medan yang terdaftar di Dinas Koperasi UMKM. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode distribusi langsung (*direct distribution method*) dengan mendatangi responden secara langsung untuk menyerahkan dan mengumpulkan kembali kuesioner. Kuesioner yang disebar kepada responden sebanyak 100 kuesioner. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

**Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. deviation
Kualitask	100	20.00	40.00	33.3000	3.83630
Kinerja	100	19.00	39.00	33.4700	3.90145
Valid N (Listwise)	100				

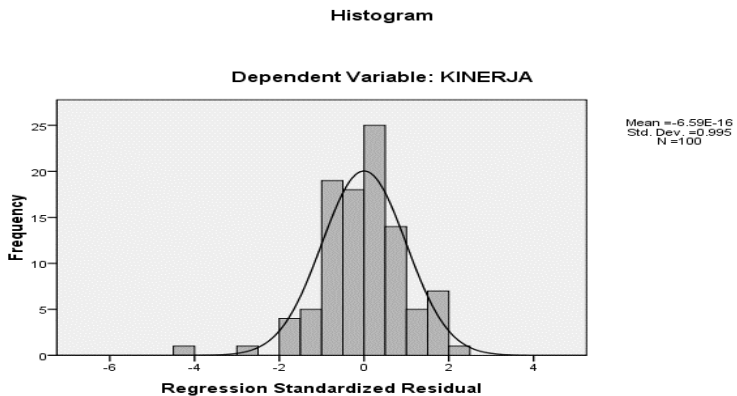
Tabel 3, pengujian statistik diketahui bahwa nilai minimum kualitas laporan keuangan sebesar 20, nilai maksimum 40 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 33.300 dengan standar deviasi 3.836. Nilai rata-rata 33.300 menunjukkan bahwa besarnya kualitas laporan keuangan sebesar 33.300. Nilai ratarata dan nilai standar deviasi kualitas laporan keuangan ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasi.



Berdasarkan pengujian statistic diketahui bahwa nilai minimum kinerja sebesar 19, nilai maksimum 39 dan nilai rata-rata (mean) sebesar 33.47 dengan standar deviasi 3.90145. Nilai rata-rata 33.47 menunjukkan bahwa besarnya kinerja sebesar 33.47. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi kinerja ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasi.

#### 5.4.4. Uji Normalitas

Metode yang digunakan dengan melihat normal *probability plot*. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Uji normalitas dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Uji Normalitas

Gambar 1 dapat dilihat bahwa dapat disimpulkan bahwa persyaratan normalitas data pada penelitian ini telah dapat terpenuhi.

### 5.4.5. Uji Multikolinearitas

Nilai *cutoff* yang menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai *VIF*  $\geq 10$  yang dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics		Keterangan
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	14.342	2.842				Tidak Terjadi Multikolinearitas
	Kualitask	.574	.085	.565	1.000	1.000	

### 5.4.6. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu (*error*) pada periode *t* dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi pada penelitian ini dideteksi dengan nilai *Durbin-Watson*. Menurut Rudiantoro dan Siregar (2012), batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai dengan +2. Adapun hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate	Durbin-Watson
1	.565a	.319	.312	3.23595	2.000

a. Predictors: (constant), kualitask

b. Dependent variable: kinerja

### 5.4.7. Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian, maka digunakan suatu model analisis regresi berganda, yaitu menggunakan variabel pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, dan transparansi dalam pajak untuk menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak badan. Pada Tabel 6 berikut hasil dari regresi berganda.

**Tabel 6. Hasil Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Usaha UMKM**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.342	2.842		5.047	.000
	Kualitaslk	.574	.085	.565	6.776	.000

a. Dependent variable: kinerja

Berdasarkan tabel diatas, persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \epsilon$$

$$Y = 14,342 + 0,574 X_1 + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat dianalisis pengaruh masing- masing variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar 14,342 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa apabila variabel independen dianggap konstan maka kinerja telah mengalami peningkatan sebesar 14,342.
- 2)  $\beta_1$  sebesar 0,574 dengan arah hubungannya positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan kualitas laporan

keuangan maka akan diikuti oleh peningkatan kinerja sebesar 0,574 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.

Berdasarkan persamaan analisis regresi linier berganda tersebut diketahui bahwa kualitas laporan keuangan harus diterapkan untuk mendukung kinerja di UMKM Medan Provinsi Sumatera Utara.

#### 5.4.8. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Kinerja UMKM

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai signifikan kualitas laporan keuangan sebesar 0,00, nilai ini signifikan apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansinya, yaitu  $\alpha = 0.05$ , dimana  $0.00 < 0.05$ . Selain itu, diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 6.776 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1.984. Dengan demikian tampak bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_1$  diterima. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja usaha UMKM. Uji simultan Tabel 7, menunjukkan bahwa hasil uji pengaruh simultan pada penelitian pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja UMKM.

**Tabel 7. Uji Simultan**

**Anova<sup>a</sup>**

**ANOVA<sup>a</sup>**

	<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	480.715	1	480.715	45.908	,000 <sup>b</sup>
	Residual	1026.195	98	10.471		
	Total	1506.910	99			

a. *Dependent Variable:* Kinerja

b. *Predictors:* (Constant), Kualitaslk

Tabel 7, uji pengaruh simultan ini dapat dilihat dari *p-value significant* sebesar 0.000. Arti signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 yang berarti variabel independen dapat digunakan pada penelitian ini dapat memprediksi variabel dependen yang ada pada penelitian ini.

#### 5.4.9. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen dan variabel dependen yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Koefisien ini disebut koefisien penentu, karena varians yang terjadi pada variabel dependen dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel independen. Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi atau persentase pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja UMKM di Medan Provinsi Sumatera Utara maka dapat dilakukan pengujian koefisien determinasi sebagai berikut:

**Tabel 8. Koefisien Determinasi**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

*Model Summary<sup>b</sup>*

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.565 <sup>a</sup>	.319	.312	3.23595

*Predictors: (Constant), Kualitaslk*

*Dependent Variable: Kinerja*

Tabel 8, menunjukkan bahwa diperoleh nilai R sebesar 0,565 dan Adjusted R Square (R<sup>2</sup>) sebesar 0.312 atau 31.2%. Koefisien determinasi atau Adjusted R Square (R<sup>2</sup>) sebesar 0.312 memberi pengertian bahwa 31.2% kinerja usaha UMKM dapat dijelaskan oleh variabel kualitas laporan keuangan, sedangkan 68,8% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak

dimasukkan model regresi ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor lain sebesar 68,8% yang dapat dijelaskan oleh variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja UMKM.

Hasil analisis dan pengujian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara kualitas laporan keuangan terhadap kinerja usaha UMKM. Hal ini berarti peningkatan kinerja UMKM akan terlihat seiring meningkatnya kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu entitas dalam satu periode akuntansi untuk melihat kinerja entitas tersebut.

Laporan keuangan yang berkualitas akan membantu para pelaku UMKM untuk memperoleh pinjaman modal dari sektor perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat. Selain itu laporan keuangan juga dapat menunjukkan sehat atau tidaknya suatu usaha tersebut. Dengan kata lain, laporan dan catatan keuangan dapat menjadi salah satu tolak ukur kunci kesuksesan bisnis. Untuk melihat informasi kinerja UMKM dapat ditemukan dalam informasi mengenai penghasilan dan beban selama suatu periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016).

Menurut (Wijaya, 2019), implementasi SAK ETAP bagi pelaporan keuangan UMKM industry kreatif sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas laporan UMKM. Dari hasil pengujian hipotesis hanya faktor informasi dan sosialisasi yang dinilai berpengaruh terhadap pemahaman pelaku UMKM terkait SAK ETAP. Sementara faktor-faktor lain seperti tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan ukuran usaha, dan lama usaha berdiri tidak berhasil mendukung hipotesis penelitian. Tingkat pemahaman pelaku UMKM menjadi kendala utama untuk melakukan implementasi SAK ETAP.

Sebagian besar responden dengan tingkat pendidikan yang rendah, latar belakang non akuntansi serta dari usaha yang tergolong mikro menjadi argumen yang mungkin sesuai untuk menjelaskan rendahnya tingkat pemahaman terkait SAK ETAP. Sehingga perlu perhatian banyak pihak untuk membentuk UMKM khususnya industri kreatif di Kota Banjarmasin untuk dapat mengimplementasikan SAK ETAP bagi tumbuh kembang usahanya.

Peneliti Almujaib et al., (2017) menyatakan bahwa Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dengan menggunakan standar akuntansi keuangan berbasis ETAP juga memungkinkan perusahaan dapat dengan mudah mengembangkan usahanya. Laporan keuangan berkualitas yang tersaji tentu akan menimbulkan kepercayaan publik terhadap usaha yang dijalankan sehingga sangat memungkinkan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan prospek usaha dengan melakukan tambahan pinjaman modal kepada lembaga keuangan.

Afif dan Mulyani (2016), menyatakan bahwa persepsi pengusaha terhadap akuntansi telah cukup baik, hanya terhambat oleh kurangnya pengetahuan tentang standar akuntansi. Hasil penelitian juga menampilkan gejala latar belakang pendidikan itu, panjang bisnis, ukuran bisnis, sikap, subyektif norma, kontrol perilaku, minat dan pemahaman pengusaha atas standar menjadi penentu persepsi tentang pentingnya akuntansi dan SAK Implementasi ETAP pada UKM Binaan PT Telkom TBK.

## **5.5. Kesimpulan**

### **5.5.1. Kualitas Laporan Keuangan**

Sebagian besar pemilik/ pelaku UMKM yang ada di Medan Provinsi Sumatera Utara belum melakukan pencatatan

pembukuan (67%), hanya sebanyak 33% UMKM yang telah melakukan pencatatan pembukuan. Meskipun mereka menyadari bahwa laporan keuangan sangat penting bagi tumbuh dan kembangnya perusahaan, namun kendala ketidakmampuan dan tidak adanya staf yang mengerti untuk melakukan pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan membuat mereka tidak melakukan pencatatan akuntansi.

Pada UMKM yang sudah melakukan pencatatan pembukuan, semuanya memiliki bagian khusus untuk pencatatan akuntansi, namun belum mempekerjakan karyawan khusus untuk pencatatan akuntansi. Mereka pertama kali membuat laporan keuangan ketika mengajukan kredit ke Bank dan komponen yang disajikan selama ini hanya dalam bentuk Neraca, dan itupun hanya dilakukan secara manual dan tidak menggunakan software akuntansi.

Ditinjau dari kualitas, khususnya kualitas laporan keuangan bagi UMKM ini, masih sangat jauh dari yang diharapkan, seperti disebutkan di atas bahwa para pemilik atau pelaku UMKM ini walaupun mereka memerlukan laporan keuangan hanya untuk memenuhi syarat bagi mereka untuk pengajuan kredit ke pihak perbankan saja, dari keterangan responden bahwa laporan keuangan tersebutpun mereka minta buat oleh pihak pemberi kredit tersebut.

### **5.5.2. SAK EMKM**

Para pemilik atau pelaku UMKM ini sangat minim sekali mendapatkan informasi khususnya tentang penyusunan laporan keuangan. Pihak IAI sudah merilis suatu standar untuk para UMKM ini sekitar tahun 2014 dengan nama Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik disingkat dengan SAK ETAP, yang inipun sebahagian besar para UMKM belum mengetahui keberadaannya apa lagi untuk



mengikuti standarnya. Setelah delapan tahun keberadaan SAK ETAP tersebut, tahun 2017 IAI kembali mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk UMKM dengan nama SAK-EMKM.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pemilik UMKM yang ada di Medan Provinsi Sumatera Utara tidak mengetahui adanya standar akuntansi keuangan EMKM (77%), hanya sebanyak 23% UMKM yang mengetahui adanya standar akuntansi keuangan EMKM. Untuk itu perlu sosialisasi dari pihak terkait, sehubungan dengan akan diberlakukannya SAK EMKM Per 1 Januari 2018 nanti, misalnya dengan melakukan pelatihan-pelatihan kepada pelaku EMKM bagaimana caranya mereka dapat menyusun laporan keuangan sederhana, dan nantinya dapat mengacu kepada SAK EMKM tersebut.

### **5.5.3. Kualitas Laporan Keuangan terhadap Kinerja**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha UMKM. Nilai signifikan kualitas laporan keuangan sebesar 0,00, nilai ini signifikan apabila dibandingkan dengan tingkat signifikansinya, yaitu  $\alpha = 0.05$ , dimana  $0.00 < 0.05$ . Selain itu, diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 6.776 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1.984. Dengan demikian tampak bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_1$  diterima. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja usaha UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2013). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Djarwanto. (2013). *Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFEE.
- Ediraras, Dharma. (2010). Akuntansi dan Kinerja UKM. *Jurnal Ekonomi Bisnis Universitas Gunadarma*. <http://www.ejournal.gunadarma.ac.id>.
- Earlk K, Stice, Stice, James D dan Skousen, Fred K. (2010). *Akuntansi Intermediate*, Buku II, Terjemahan Safrida Rumodang Parulian dan Ahmad Maulana. Edisi Kelima Belas. Jakarta : Salemba Empat.
- Grace, Tianna, Solovida. (2003) *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyiapan dan Penggunaan Informasi Akuntansi pada Perusahaan Kecil dan Menengah di Jawa Tengah*, Tesis Magister Akuntansi UNDIP Semarang.
- Gusnardi, Jawandri Citra PS & Fenny Trisnawati. (2015). *The Influence Quality of Financial Reports for Lending and Prospects of Implementation SAK ETAP in the Small and Medium Enterprises (SMEs) in Pekanbaru City*. *Pekbis Jurnal*, Vol.7, No.3, November 2015: 174-184
- Harahap, Sofyan Syafri. (2015). *Analitis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2016, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Jakarta.

- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Merchant, K. A., & Stede, W. A. Van der. (2017). *Management Control Systems*. Muhammad Ashari (2021) KPAI Rilis Data Perundungan Selama 2021, Tawuran Pelajar PalingBanyak. Diakses pada 16 April 2022.
- M.Fuad, dkk. (2015). *Pengantar Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir S. (2010). *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Liberty.
- Probosari, Devi. (2014). *Praktik Akuntansi dan Implikasinya Pada Kualitas Informasi (Sebuah Studi Pada UMKM)*. Malang : Universitas Brawijaya.
- Purwati, Atiek Sri. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada UMKM di Kabupaten Banyumas*. Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman.
- Rini Indriani dan Wahiddatul Khoiriyah. (2010). *Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Informasi Asimetri*. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto. 2010.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. (2011). *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Visimedia Pustaka.

- Rudiantoro, R., dan Siregar, SV. (2012). *Kualitas Laporan Keuangan UMKM Serta Prospek Implementasi SAK ETAP*. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia Vol 9 No.1, Juni 2012.
- Simanjuntak, P.J. (2015). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sinulingga, Sukaria. (2013). *Metode Penelitian*. Medan: USU Press.
- Solihin, Ismail. (2016). *Pengantar Bisnis : Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, Edisi Pertama. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Wicaksono, A. B., & Yuyetta, E. N. (2013). *Pengaruh Kecakapan Manajerial Terhadap Praktik Manajemen Laba dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi*. Diponegoro Journal of Accounting. Vol. 2 No. 4.

## BIOGRAFI PENULIS

**Dr. Hj. Sari Bulan Tambunan, SE, M.MA**



**P**enulis dilahirkan di kotamadya Padangsidempuan provinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 Pebruari 1960. Lulusan Sarjana Ekonomi (S1) Jurusan Akuntansi pada Tahun 1991 dan Lulusan Magister Manajemen Agribisnis di Universitas Medan Area. Lalu melanjutkan studi Doktor Ilmu Akuntansi (S3) pada Program Doktor Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara tahun 2020.

Berkarir di YPHAS- UMA sebagai Akuntan Internal awalnya di tahun 1988 sampai tahun 2005, dan dari tahun 2005 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan di UMA dan juga merupakan Dosen Tetap YPHAS UMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi mulai 1991 s/d sekarang. Karir lainnya dalam pengembangan profesi telah melakukan penelitian sebagai ketua peneliti dengan skema Hibah bersaing didanai Direktorat Riset & Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kemenristekdikti tahun I di tahun 2017 dan penelitian Strategi Nasional Institusi (PSNI) untuk tahun II di tahun 2018.

# **DETERMINAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA ORGANISASI BISNIS (TINJAUAN PADA UMKM)**

## **AUTHOR**

Dr. Hj. Sari Bulan Tambunan, S.E.,M.M.A

Tujuan utama didirikannya suatu organisasi adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham atau nilai perusahaan dalam jangka pendek. Guna mengetahui apakah tujuan tersebut terpenuhi atau tidak, maka dibutuhkan suatu cara untuk menilai hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan.

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.



**PUBLIHER BY**

PT Inovasi Pratama Internasional